

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021**



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur dan Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Tahun 2019 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Kerja (Renja) Renja 2019 ini disusun guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Jambi.

Pada kesempatan ini kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan Renja 2019 ini diucapkan terima kasih. Kami menyadari bahwa dalam penyajian dan penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kami berharap kiranya Renja 2019 ini bisa mendukung upaya meningkatkan kinerja dan mencari terobosan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jambi, Juli 2018

Kepala Dinas,



**Ir. Akhmad Maushul**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19651211 199009 1 001**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2016 – 2021 ini dapat tersusun dengan Visi ***“Pertanian Tangguh, Yang Berkeadilan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Petani dan Peternak serta Ketersediaan Produk Hewani Yang ASUH Tahun 2021 Tahun 2021”***.

Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ini merupakan penjabaran atas Visi dan Misi Gubernur Jambi 2016 – 2021. Kami menyadari, sangat dimungkinkan dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis ke depan.

Besar harapan kami program dan kegiatan yang tersusun dalam Rencana Strategis Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ini, dapat terlaksana untuk mewujudkan Jambi TUNTAS 2021.

Terima Kasih

Jambi, Juli 2018

Kepala Dinas  
Tanaman Pangan, Hortikultura  
dan Peternakan

**Ir. Akhmad Maushul**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19651211 199009 1001**



	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	vi
Daftar Lampiran .....	vii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	12
2.2. Sumberdaya SKPD .....	32
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .....	42
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	60
<b>BAB 3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	64
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	65
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota .....	68
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.....	71
<b>BAB 4. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1. Visi dan Misi SKPD .....	92
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	94
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	97
<b>BAB 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>112</b>
<b>BAB 6. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 -2021.....</b>	<b>126</b>
<b>BAB 7. PENUTUP.....</b>	<b>128</b>



# DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Jumlah PNS dan CPNS Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2015 ...	32
Tabel 2.2. Jumlah Petugas Teknis Lapangan .....	33
Tabel 2.3. Sarana Pelayanan Operasional Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	35
Tabel 2.4. Daftar Barang Inventaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2016 ....	36
Tabel 2.5. Luas Baku Lahan Sawah di Provinsi Jambi Tahun 2015 .....	37
Tabel 2.6. Daftar Lokasi BBI/BBU/BBP Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2015 .....	39
Tabel 2.7. Daftar Penangkar Benih Binaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Tahun 2015 .....	40
Tabel 2.8. Data Sebaran Varietas Unggul Padi yang Dominan di Provinsi Jambi Tahun 2015 .....	41
Tabel 2.9. Data sebaran Varietas Unggul Jagung Yang Dominan di Provinsi Jambi Tahun 2015 .....	41
Tabel 2.10. Data Sebaran Varietas Unggul Kedelai Yang Dominan di Provinsi Jambi Tahun 2015 .....	42
Tabel 2.11. Nilai Tukar Usaha Pertanian di Provinsi Jambi .....	43
Tabel 2.12. Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Jambi (2011 - 2015) .....	45
Tabel 2.13. Perkembangan Produksi Jagung di Provinsi Jambi (2011 - 2015) .....	46



Tabel 2.14. Perkembangan Produksi Kedelai di Provinsi Jambi (2011 - 2015) .....	46
Tabel 2.15. Perkembangan Pengeluaran Sertifikasi Benih Padi dan Palawija di Provinsi Jambi .....	47
Tabel 2. 16 Luas Serangan Dan Luas Pengendalian OPT Pada Tanaman Padi di Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015 .....	48
Tabel 2.17 Luas Serangan Dan Luas Pengendalian OPT pada Tanaman Jagung di Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015 .....	48
Tabel 2.18 Luas Serangan Dan Luas Pengendalian OPT Pada Tanaman Kedelai di Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015 .....	49
Tabel 2.19 Perkembangan Produksi Bawang Merah, Kentang dan Cabe di Provinsi Jambi (2011 - 2015) .....	53
Tabel 2.20. Perkembangan Produksi Buah - buahan unggulan daerah (Durian, Duku dan Jeruk) di Provinsi Jambi (2010 - 2015) ...	54
Tabel 2.21 Luas Serangan Dan Luas Pengendalian OPT Pada Tanaman Cabai di Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015 .....	55
Tabel 2.22 Peran Subsektor Peternakan Dalam PDRB Provinsi Jambi (Berdasarkan Harga Konstan) .....	56
Tabel 2.23 Perkembangan Populasi Ternak di Provinsi Jambi .....	57
Tabel 2.24 Perkembangan APBD dan PAD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi .....	59
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Urusan SKPD .....	64
Tabel 3.2 Matrik Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 .....	66
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi .....	67



Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan .....	70
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	75
Tabel 3.6	Matrik Analisis Faktor Kekuatan.....	79
Tabel 3.7.	Matrik Analisis Faktor Kelemahan.....	81
Tabel 3.8	Matrik Analisis Faktor Peluang .....	86
Tabel 3.9	Matrik Analisis Faktor Tantangan.....	89



# DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Segi Tiga Pertumbuhan ISM - GT .....	72
Gambar 2. Peta Pembagian Wilayah Kawasan Tanaman Pangan .....	74
Gambar 3. Peta Pembagian Wilayah Kawasan Tanaman Hortikultura	74



# DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

**D**alam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun regional, perlu disusun suatu perencanaan strategik yaitu berupa proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Rencana Stategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2016 – 2021 dan Renstra ini juga merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016 – 2021.

RPJMD Provinsi Jambi merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Jambi yang memuat sasaran dan strategi pembangunan di Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi SKPD untuk mendukung pencapaian program prioritas Gubernur tersebut. Dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan SKPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021.



Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 yang diarahkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, juga selaras dan mengakomodir Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014 sehingga diharapkan adanya sinergitas kebijakan, program dan kegiatan.

Sejalan dengan RJPMD Provinsi Jambi, pembangunan pertanian sampai saat ini memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional, yang dilihat dari pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah rumah tangga yang mengandalkan sumber pendapatan dari sub sektor pangan, hortikultura dan peternakan, peningkatan pendapatan masyarakat, pangan masyarakat dan sinergisme dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sekarang dan ke depan diperlukan peningkatan peran dari berbagai kalangan (*stake holders*).

Dengan penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, membawa konsekuensi akan pentingnya pengaturan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang mengakomodasi semangat reformasi yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan. Sistem penganggaran yang lebih responsif diperlukan guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam bentuk hasil pembangunan, kualitas layanan, dan



efisiensi pemanfaatan sumberdaya serta mempermudah pencapaian sasaran program pembangunan pertanian secara efektif, efisien, akuntabel dan terukur.

Dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan secara keseluruhan, usaha produksi yang berkaitan dengan pilihan varietas dan pilihan jenis komoditas masing-masing memiliki peluang ekonomi yang besar, tergantung dari lokasi, segmen target konsumen, ketersediaan sumberdaya dan kemampuan modal dari pelaku usaha. Dengan demikian, sebenarnya tidak tepat untuk membatasi pengembangan komoditas hanya pada jenis komoditas yang memiliki pasar dan peluang ekonomi spesifik.

Komoditas tanaman pangan merupakan komoditas yang sangat penting dan strategis karena jenis komoditas ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang hakiki, yang setiap saat selalu harus tersedia dalam jumlah yang cukup dengan mutu yang layak, aman dikonsumsi. Disamping itu, komoditas produk hortikultura yang merupakan sumber vitamin memegang peranan yang tidak kalah dibandingkan komoditas pangan, karena merupakan penyedia buah-buahan, sayur-sayuran, dan obat-obatan, disamping tanaman hias. Demikian pula produk peternakan juga memegang peranan penting dalam upaya ketahanan pangan dan mencerdaskan manusia berkualitas. Fungsi protein hewani menentukan dalam mencerdaskan manusia karena kandungan asam aminonya yang tidak dapat tergantikan. Protein hewani biasanya berasal dari daging, telur dan susu. Dari tahun ke tahun, kebutuhan produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia serta perbaikan kondisi perekonomian masyarakat.



Untuk usaha peternakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usahatani masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Pengelolaan ternak tidak saja ditujukan untuk menghasilkan sumber protein hewani (daging, telur dan susu) tetapi juga merupakan pendukung dalam pengembangan sub sektor lain seperti tanaman pangan, perkebunan dan industri pengolahan hasil pertanian. Pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk organik merupakan salah satu contoh dukungan tersebut. Oleh karena itu, pengembangan sub sektor peternakan memiliki *multiplier effects* yang sangat luas dalam pembangunan perekonomian masyarakat pertanian.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Penyusunan Rencana Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) yang disempurnakan melalui Undang-Undang



Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif:



20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi;
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;
29. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;



30. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019;
31. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 – 2019;
32. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 – 2019;
33. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 – 2019;
34. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015 – 2019.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan berbagai kebijakan dan strategi percepatan pembangunan Pertanian di Provinsi Jambi ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks;
2. Menentukan arah sebagai acuan bagi seluruh jajaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam menentukan program prioritas dan kegiatan tahunan;
3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja pembangunan Pertanian di Provinsi Jambi serta melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
4. Sebagai indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kerja tahunan setiap Bidang/Sekretariat/UPTD;



5. Memberikan penjabaran gambaran tentang kondisi pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan secara umum, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas yang juga sekaligus Visi dan Misi Gubernur Jambi;
6. Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal, antar dan lintas SKPD dengan masyarakat pertanian dan pelaku agribisnis berbasis pertanian;
7. Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar atau acuan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program dalam kegiatan yang mampu merealisasikan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.



#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Menyampaikan gambaran tugas pokok, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi; Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi; serta analisis SWOT kondisi lingkungan strategis berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi Dinas dalam menjalankan visi dan misi.

##### **BAB III : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, serta Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2016 – 2021.

##### **BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Merupakan gambaran Visi dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah; serta Strategi dan Kebijakan yang didasarkan atas tugas pokok dan



fungsi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

**BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi; Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dari semua kegiatan yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

**BAB VI : INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 – 2021**

Menyajikan tabel Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 serta sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

**BAB VII : PENUTUP**



# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN SKPD

### 2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

**D**inas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terdiri dari Sekretariat dan empat Bidang. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk berdasarkan dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi.

Adapun UPTD yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah terdiri dari UPTD Balai Pembibitan Ternak; UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo; UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT); UPTD Balai Proteksi Tanaman pangan dan hortikultura (BPTPH); UPTD Balai Pendidikan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPSDMP); UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta UPTD Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan (BPTA & KJ).



Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;



- j. Penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- m. Pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, terdiri dari :

**1. Kepala Dinas,**

**2. Sekretariat, terdiri dari :**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

**3. Bidang Peternakan, terdiri dari :**

- a. Seksi Pembibitan dan Produksi
- b. Seksi Pakan Peternakan
- c. Seksi Kelembagaan dan Permodalan



4. **Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan**, terdiri dari :
  - a. Seksi Kesehatan Hewan
  - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
5. **Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**, terdiri dari :
  - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
6. **Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**, terdiri dari :
  - a. Seksi Lahan dan Irigasi
  - b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian
  - c. Seksi Penyuluhan
7. **UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT)**, terdiri dari :
  - a. Sub. Bagian Tata Usaha
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
8. **UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)**, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional



- 9. UPTD Balai Pendidikan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPSDMP),** terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
  - c. Seksi Bimbingan Lanjutan dan Pengabdian Masyarakat
- 10. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura,** terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Pengelolaan Benih Tanaman Pangan
  - c. Seksi Pengelolaan Benih Tanaman Hortikultura
- 11. UPTD Balai Pengembangan Taman Angrek dan Kultur Jaringan (BPTA & KJ),** terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Pengembangan Kultur Jaringan
- 12. UPTD Balai Pembibitan Ternak,** terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha
- 13. UPTD Balai Laboratorium Keswan dan Kesmavet,** terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha
- 14. UPTD Kebun Binatang,** terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Konservasi UPTD Kebun Binatang
  - c. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan



Berdasarkan Bab VIII Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, maka masing-masing Eselon III pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

#### **1. Sekretariat Dinas**

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, serta penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 2. Bidang Peternakan

Tugas pokok dan fungsi Bidang Peternakan adalah membantu Dinas dalam rangka menyusun bahan kebijakan, pengelolaan dan penjaminan, penyediaan, pengujian, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan teknis serta pembinaan di bidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan serta koordinasi dengan mitra/stakeholder terkait serta pembinaan di Bidang Peternakan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan anggaran di bidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- b. Pengidentifikasian kebutuhan dan penataan di bidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- c. Penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- d. Penyediaan, pengelolaan dan penjaminan mutu dan kelangsungan wilayah sumber bibit, pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit ternak, peningkatan populasi dan produktifitas ternak, pemberdayaan dan pembentukan kelompok;
- e. Penyediaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan serta pengujian mutu pakan;
- f. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan;



- g. Pemberian rekomendasi izin usaha di Bidang Peternakan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **3. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan**

Tugas pokok dan fungsi Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan adalah membantu Dinas dalam rangka menyusun bahan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pembinaan, penjaminan, pengawasan teknis dan pengendalian serta pembinaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan anggaran di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Perumusan kebijakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan, pemasaran hasil peternakan;
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;



- e. Penyiapan dan perumusan kebijakan bimbingan teknis dan pembinaan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- f. Penyediaan, pengelolaan, penjaminan mutu dan peredaran produk di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- g. Penjaminan dan penetapan status kesehatan dan penyakit hewan;
- h. Pemberian rekomendasi dan ijin usaha di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan;
- i. Pengidentifikasian kebutuhan dan penataan di bidang perbibitan, produksi dan kelembagaan, pakan ternak, prasarana dan sarana peternakan;
- j. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas bidangnya.

#### **4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. Pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



## 5. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, program dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyelenggaraan Penyuluhan;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. Pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. Pemberian bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang penyuluhan;
- g. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Peningkatan kapasitas penyuluh ASN, swadaya dan swasta serta pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;



- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyelenggaraan penyuluhan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **6. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT)**

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di bidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu dan perdagangan benih serta pengelolaan keperbenihan tanaman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BPSPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan bimbingan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan teknis di bidang perbenihan tanaman berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- b. Pelaksanaan pelayanan operasional, sertifikasi benih dalam rangka menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat;
- c. Pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium benih;
- d. Pelaksanaan pelayanan penilaian mutu dan perdagangan benih tanaman serta pengesahan label yang berisi data mutu benih yang layak edar termasuk benih impor serta sesuai dengan standar yang diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan penilaian kultivar dan klon serta penetapan pohon induk hortikultura tahunan;



- f. Pelaksanaan pengelolaan perbanyak benih sumber;
- g. Pelaksanaan penyusunan dan penyimpanan pedoman dan atau peraturan perbenihan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- h. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan mutu benih pada produsen/pedagang benih tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- i. Pelaksanaan bimbingan ketatausahaan pengawasan dan sertifikasi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **7. UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hortikultura (BTPH)**

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPH) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam pengamatan, peramalan, pengembangan, penerapan teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), masyarakatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), pengembangan dan evaluasi sarana pengendalian OPT.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BTPH mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengamatan OPT, unsur iklim dan kejadian bencana alam;
- b. Pelaksanaan penetapan diagnosa organisme pengganggu tanaman;
- c. Pelaksanaan penyebarluasan informasi organisme pengganggu tanaman;
- d. Pelaksanaan peramalan OPT secara spesifik lokasi;



- e. Pelaksanaan penetapan rekomendasi pengendalian OPT secara spesifik lokasi;
- f. Pelaksanaan pengembangan penerapan teknis pengendalian OPT;
- g. Pelaksanaan pemasyarakatan PHT;
- h. Pelaksanaan evaluasi mutu/residu serta pemantauan dampak penggunaan sarana pengendalian OPT;
- i. Pelaksanaan pembinaan ketatausahaan UPTD Balai;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **8. UPTD Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPSDMP)**

UPTD Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPSDMP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian serta melaksanakan bimbingan lanjutan terhadap purnawidya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BPSDMP mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Perencanaan pengembangan SDM Pertanian melalui analisa Jabatan/pekerjaan dan prioritas pembangunan wilayah kerja;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan/atau kegiatan lainnya;
- c. Pelaksanaan penilaian terhadap hasil kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian, sebagai bahan pengembangan selanjutnya secara terus-menerus;



- d. Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap purnawidya dalam mendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi dan/atau pembentukan yang akan dilimpahkan/diberikan oleh pemerintah;
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **9. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura**

UPTD Balai Perbenihan Tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam rangka melayani Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul dengan menerapkan prinsip pelayanan, koordinasi dan integrasi baik ke dalam maupun ke luar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan Balai;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana tata operasional Balai dalam rangka pelayanan terhadap Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai;
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbanyakan benih bermutu antara Balai Benih dengan produsen benih swasta dan penangkar benih;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan benih sumber dalam rangka pola kemitraaan untuk memproduksi benih bermutu dari varietas unggul;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**10. UPTD Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan (BPTA dan KJ).**

UPTD Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan (BPTA & KJ) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam rangka meningkatkan Produktivitas dan efektifitas pengelolaan Taman Anggrek Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BPTA dan KJ mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan Taman Anggrek yang Indah, Asri, Bersih sehingga dapat menjadi tempat untuk Rekreasi/Agrowisata;
- b. Pelaksanaan penyimpanan koleksi tanaman anggrek, baik anggrek alam maupun anggrek hasil silangan;
- c. Pelaksanaan penyimpanan sumber plasma nutfah;
- d. Pelaksanaan penyediaan benih anggrek yang bermutu dengan cara kultur jaringan;



- e. Pelaksanaan penyediaan informasi, tempat pembelajaran budidaya angrek dan pengembangan benih dengan cara kultur jaringan.

#### **11. UPTD Balai Pembibitan Ternak**

UPTD Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam hal mutu genetik ternak serta pelestarian plasma nutfah. Secara garis besar, UPTD melaksanakan operasional pembibitan, menguji dan menerapkan teknologi pengembangan ternak, mengkaji perkembangan masing-masing ternak dan melaksanakan kebijakan pembibitan ternak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pembibitan Ternak mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran balai;
- b. Pelaksanaan operasional pembibitan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembibitan berbagai jenis ternak dalam rangka penyediaan bibit ternak yang berkualitas tinggi (ternak unggul);
- d. Pelaksanaan pemeliharaan ternak Bull;
- e. Menyediakan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- f. Produksi semen beku keseluruh kabupaten/kota;
- g. Pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi pengembangan ternak;
- h. Pelaksanaan pengkajian dan analisis perkembangan masing-masing ternak;
- i. Pelaksanaan kebijakan pembibitan ternak dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



## 12. UPTD Balai Laboratorium Keswan dan Kesmavet

UPTD Balai Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam diagnosa penyakit hewan, pemeriksaan bahan pangan asal hewan dan bahan non asal hewan, menyiapkan bahan pemetaan penyakit dan menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Balai;
- b. Penyiapan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis pemeriksaan;
- c. Penerapan teknologi dalam pemeriksaan laboratorium;
- d. Penyiapan dan penyusunan kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium;
- e. Penyusunan rencana pengamatan penyakit hewan dan penyiapan bahan pembuatan peta penyakit;
- f. Penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan diagnosa penyakit maupun yang berkaitan dengan uji kesmavet
- g. Penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas hasil pelayanan jasa pemeriksaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 13. UPTD Kebun Binatang



UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di bidang pengelolaan kebun binatang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi mempunyai fungsi:

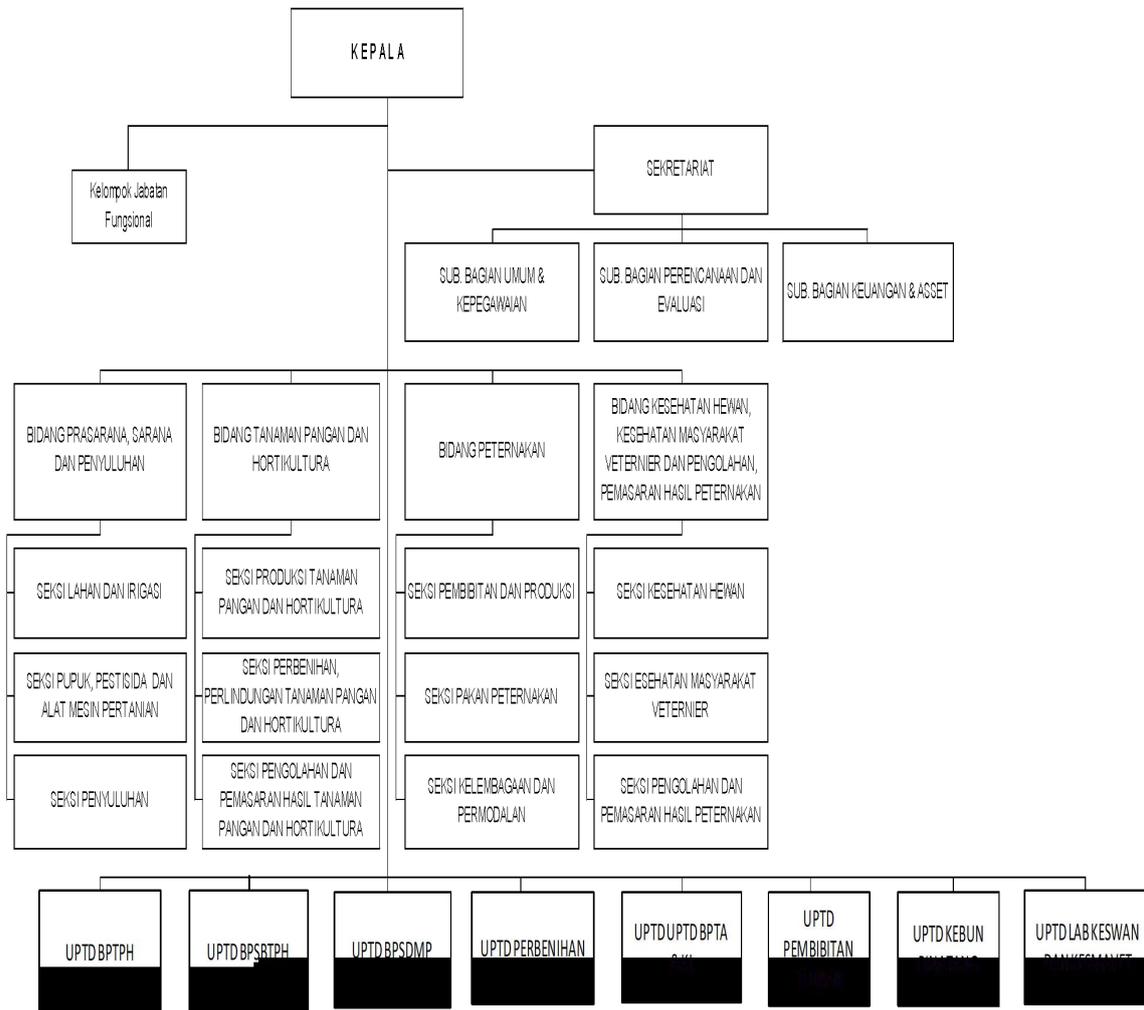
- a. Perencanaan pengembangan sesuai kaidah konservasi, pelestarian keanekaragaman satwa;
- b. Pelaksanaan perawatan dan pengamanan ilmu pengetahuan satwa sesuai dengan kebutuhan pengunjung;
- c. Pelaksanaan tempat rekreasi alam dan ruang hijau;
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah sebagaimana struktur berikut ini.

#### **STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA**



## DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI



## 2.2. SUMBER DAYA SKPD

### 1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2016 sebanyak 420 orang.

Selengkapnya rincian jumlah PNS dan CPNS Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menurut golongan adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Jumlah PNS dan CPNS Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2016

GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	Tenaga Fungsional	Staf	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	-	1	-	-	1	-	2
Golongan IV/b	-	-	7	-	-	4	9	20
Golongan IV/a	-	-	4	2	-	7	10	23
<b>Jumlah Golongan IV</b>	-	-	<b>12</b>	<b>2</b>	-	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>45</b>
Golongan III/d	-	-	-	8	-	28	14	50
Golongan III/c	-	-	-	13	-	31	23	67
Golongan III/b	-	-	-	5	-	77	26	108
Golongan III/a	-	-	-	-	-	26	12	45
<b>Jumlah Golongan III</b>	-	-	<b>12</b>	<b>28</b>	-	<b>174</b>	<b>94</b>	<b>270</b>
Golongan II/d	-	-	-	-	-	6	4	10
Golongan II/c	-	-	-	-	-	35	9	44
Golongan II/b	-	-	-	-	-	28	4	32
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	13	13
<b>Jumlah Golongan II</b>	-	-	<b>12</b>	<b>28</b>	-	<b>243</b>	<b>124</b>	<b>99</b>
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	2	2
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	3	3
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>Jumlah Golongan I</b>	-	-	<b>12</b>	<b>28</b>	-	<b>243</b>	<b>130</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL</b>								<b>420</b>



Sebagai SKPD tingkat provinsi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tidak memiliki aparat yang melakukan tugas operasional di lapangan. Pelaksanaan tugas operasional lapangan pelayanan dalam pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas teknis kabupaten/kota, yang saat ini dirasakan sangat terbatas jumlahnya dibandingkan cakupan tugas yang ada. Jumlah petugas teknis operasional lapangan yang tersedia di masing-masing Kabupaten/Kota disajikan pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2. Jumlah Petugas Teknis Lapangan

Kabupaten/Kota	Inseminator	Paramedis	Dokter Hewan	Pengawas Kesmavet
a. Kota Jambi	12	2	18	1
b. Batang Hari	10	4	7	1
c. Muaro Jambi	9	7	6	3
d. Bungo	12	17	3	1
e. Tebo	16	21	5	1
f. Merangin	12	19	3	1
g. Sarolangun	7	1	8	2
h. Kerinci	14	8	2	0
i. Sungai Penuh	5	4	2	2
j. Tanjung Jabung Barat	12	7	5	1
k. Tanjung Jabung Timur	14	26	7	0
<b>Jumlah</b>	<b>123</b>	<b>120</b>	<b>66</b>	<b>13</b>



Jumlah petugas teknis lapangan, terutama petugas paramedis, yang tersedia saat ini masih dirasakan sangat kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Jambi. Sebagai pembanding antara ketersediaan petugas teknis dengan luas wilayah dapat digunakan jumlah kecamatan di Provinsi Jambi yaitu sebanyak 141 kecamatan. Dengan jumlah tersebut berarti ada petugas paramedis peternakan yang harus melayani lebih dari 1 kecamatan. Kelangkaan petugas ini tentunya akan semakin diperparah dengan kondisi infrastruktur wilayah yang sebagian besar masih sangat terbatas sehingga kemampuan petugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin sulit.

## **2. Sarana dan Prasarana**

Sarana pelayanan peternakan dan kesehatan hewan yang sepenuhnya dikuasai oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi antara lain berupa Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Type B yang berlokasi di Kota Jambi. Laboratorium ini dikelola oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Sedangkan sarana pelayanan yang menunjang kegiatan operasional lapangan sepenuhnya dikelola oleh SKPD Kabupaten/Kota. Sarana pelayanan dimaksud terdiri dari Pos IB (Inseminasi Buatan), Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) dan RPH (Rumah Potong Hewan). Jumlah sarana pelayanan yang tersedia di masing-masing Kabupaten/Kota disajikan pada tabel 2.3 berikut ini.



Tabel 2.3. Sarana Pelayanan Operasional Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten/Kota	Pos IB	Puskesmas	RPH
a. Kota Jambi	1	2	1
b. Batanghari	4	4	1
c. Muaro Jambi	5	4	1
d. Bungo	9	3	1
e. Tebo	6	5	2
f. Merangin	6	3	1
g. Sarolangun	5	4	1
h. Kerinci	12	4	0
i. Sungai Penuh	1	1	1
j. Tanjung Jabung Barat	10	5	0
k. Tanjung Jabung Timur	8	11	0
<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>46</b>	<b>9</b>

Selain didukung oleh beberapa orang staf yang cukup berkompentensi, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (yang tercatat sebagai asset) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah sebagaimana table 2.4 berikut ini.



Tabel. 2.4. Daftar Barang inventaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2016

Nama Barang	Jumlah
1. Alat-alat Berat	82
2. Kendaraan Roda 4	26
3. Kendaraan Roda 2	138
4. Kendaraan Roda 3	4
5. Gerobak Angkutan	10
6. Alat-alat Bengkel dan Ukur	30
7. Alat-alat Pertanian/Peternakan	47
8. Alat Studio dan Komunikasi	24
9. Alat-alat Kedokteran	1
10. Air Conditioning (AC)	30
11. Alat-alat Laboratorium	513
12. Mesin Potong Rumput	10
13. Mesin Ketik Manual Portable	15
14. Mesin Ketik Manual Standar	3
15. Mesin Calculator	10
16. Lemari Besi	6
17. Rak Besi/Metal	10
18. Rak Kayu	12
19. Filling Besi/Metal	63
20. Filling Kayu	10
21. Brankas	6
22. Lemari Kaca	22
23. Lemari kayu	33
24. Meja Kayu/Rotan	213
25. Kursi	595



<b>26. Kipas Angin</b>	<b>31</b>
<b>27. Komputer (PC)</b>	<b>35</b>
<b>28. Laptop/Note Book</b>	<b>32</b>
<b>29. Printer</b>	<b>36</b>
<b>30. UPS</b>	<b>6</b>
<b>31. Buku Perpustakaan</b>	<b>300</b>
<b>32. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>44</b>
<b>33. Gedung dan Bangunan</b>	<b>122</b>

Sumber : Laporan Inventarisasi Asset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2016 data diolah

### 3. Sumber Daya Lahan

Tahun 2015 luas baku sawah irigasi seluas 40.703 Ha, tadah hujan seluas 39.884 Ha, pasang surut 31.388 Ha dan Rawa Lebak seluas 25.157 Ha, dengan perincian per Kabupaten/Kota sebagaimana Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5. Luas Baku Lahan Sawah di Provinsi Jambi Tahun 2015.

No	Kabupaten/Kota	Irigasi	Tadah Hujan	Pasang Surut	Rawa Lebak	Jumlah
1	Kerinci	17.560	1.599	-	1.676	20.835
2	Merangin	7.800	4.193	-	465	12.458
3	Sarolangun	1.725	3.644	70	763	6.202
4	Batang Hari	354	5.688	-	11.006	17.048
5	Muaro Jambi	2.147	11.836	1.223	7.735	22.941
6	Tanjab Timur	-	2.971	20.398	267	23.636
7	Tanjab Barat	1.071	50	9.697	-	10.818
8	Tebo	1.000	6.428	-	2.773	10.201
9	Bungo	6.358	493	-	269	7.120
10	Kota Jambi	-	1.490	-	-	1.490
11	Kota Sungai Penuh	2.688	1.492	-	203	4.383
<b>Jumlah Thn 2015</b>		<b>40.703</b>	<b>39.884</b>	<b>31.388</b>	<b>25.157</b>	<b>137.132</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi (data diolah)



#### 4. Sumberdaya Institusi

Institusi perbenihan adalah lembaga Pemerintahan maupun swasta yang bergerak dibidang perbenihan, institusi perbenihan di daerah Provinsi Jambi terdiri dari :

##### a. Instansi Pemerintah (BPSPT dan UPTD Perbenihan)

Unit yang menangani Pengawasan dan Sertifikasi Benih di Jambi adalah **UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman (BPSPT)**, yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap suatu varietas tanaman yang akan dilepas ke masyarakat dan pelabelan benih.

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi para konsumen (petani) pemakai benih dalam upaya mendapatkan benih bermutu serta menciptakan iklim perdagangan benih yang sehat antara produsen penyalur atau pedagang penyalur serta konsumen pemakai benih (petani).

Unit lain yang menangani pengembangan perbenihan mulai dari perbanyakan dan penyalurannya ditangani oleh **UPTD Perbenihan**. UPTD ini membawahi beberapa Balai Benih Induk (BBI) yaitu BBI Padi Sukajaya di Lubuk Ruso, BBI Palawija di Sebapo, BBI Hortikultura di Sungai Tiga dan Balai Pengembangan Kedelai Alai Ilir di Muara Bungo, BB Kentang Kayu Aro dan BB Kentang Jangkat.

##### b. BUMN (Perum Sang Hyang Seri dan PT. Pertani)

Perum Sang Hyang Seri dan PT. Pertani yang sebelumnya merupakan produsen sekaligus pedagang benih, bertugas menyediakan benih sebar bagi petani. Perum Sang Hyang Seri dan PT. Pertani Cabang Jambi dalam pengadaan benih melakukan kerjasama dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani karena tidak mempunyai areal perbanyakan benih sendiri. Untuk memperluas jangkauan pemasaran



benih Perum Sang Hyang Seri dan PT. Pertani melakukan kerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

**c. Swasta, terdiri dari produsen benih swasta dan petani penangkar**

Produsen benih swasta bertugas menyediakan benih atau bibit yang diperlukan petani di Provinsi Jambi, dimana terdapat seluas 225 Ha luas lahan produsen benih di Provinsi Jambi. Jumlah Balai Benih dan produsen benih dimasing-masing Kabupaten/Kota tertera pada Tabel 2.6 dan 2.7 berikut ini

Tabel 2.6. Daftar Lokasi BBI/BBU/BBP Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Nama	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas (Ha)	Tinggi Dpl (M)	Kewenangan
1	BBI Hortikultura Sungai Tiga	Muaro Jambi	Jambi Luar Kota	11,5	10	Provinsi
2	BBI Palawija Sebapo	Muaro Jambi	Jambi Luar Kota	7	15	Provinsi
3	BBU Arang-arang	Muaro Jambi	Kumpeh Ulu	5	10	Kabupaten
4	BBI Padi Sukajaya	Batang Hari	Pemayung	40	15	Provinsi
5	BBU Karmeo	Batang Hari	Muara Tembesi	3	15	Berfungsi
6	BBP Pulau Temiang	Tebo	Tebo Ulu	3	85	Berfungsi
7	BBU Margoyoso	Merangin	Tabir Ilir	2	90	Berfungsi
8	BBU Kentang Jangkat	Merangin	Jangkat	6,5	1200	Berfungsi
9	BBU Hiang	Kerinci	setinjau Laut	2	600	Berfungsi
10	BBI Kentang Kayu Aro	Kerinci	Kayu Aro	13,7	1200	Berfungsi
11	BBU Limun	Sarolangun	Limun	7	150	Berfungsi
12	BBU Pelawan Singkut	Sarolangun	Pelawan Singkut	20	100	Berfungsi
<b>Jumlah</b>				<b>120,7</b>		

Sumber : Buku Data Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2015)



Tabel 2.7. Daftar Penangkar Benih Binaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Komoditi	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Kabupaten/Kota	Kecamatan/Desa
1	Padi Sawah	Suka Maju Bersama	25	Muaro Jambi	Kumpeh Ulu/Sakean
2	Padi Sawah	Berkat Usaha	25	Tanjab Barat	Tungkal Ilir/Teluk Sialang
3	Padi Sawah	Usaha Bersama	25	Tanjab Timur	Nipah Panjang/Simp. Datuk
4	Padi Sawah	Tani Makmur	25	Bungo	Jujuhan Ilir/Sari Mulya
5	Padi Sawah	Setia Kawan	25	Bungo	Jujuhan Ilir/Sari Mulya
6	Padi Sawah	Sinar Usaha	25	Tebo	Tebo Ulu/Pagar Puding
7	Padi Sawah	Supra Jaya	25	Kerinci	Air Hangat Timur/kementan Kebalai
8	Padi Sawah	Warung Web	25	Kerinci	Keliling Danau/Tanjung Pauh Mudik
9	Padi Sawah	KWT Nusa Indah	25	Sungai penuh	Tanah Kampung/Pendung
10	Padi Sawah	Suka Tani II	25	Batang Hari	Pemayang/Lubuk Ruso
<b>Jumlah</b>			<b>225</b>		

Sumber : Buku Data Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2015)

Penangkar benih berperan melanjutkan tugas dari Balai Benih dalam menyediakan benih sebar (ES) bagi petani. Pada umumnya penangkar benih ini hanya menyediakan calon benih, selanjutnya dibeli oleh produsen benih untuk diproses lebih lanjut menjadi benih. Oleh karena itu pembinaan perlu dilakukan secara intensif bagi para penangkar benih padi, palawija dan hortikultura. Adapun dominasi penggunaan benih di Provinsi Jambi adalah sebagaimana tabel 2.8 dan 2.9 berikut ini.



Tabel 2.8. Data Sebaran Varietas Unggul Padi Yang Dominan di Provinsi Jambi Tahun 2015

NO	Varietas	Kabupaten/Kota											Total
		Kota Jambi	M.Jambi	Batang Hari	Tebo	Bungo	Sarolangun	Merangin	Kerinci	Sei penuh	Tanjabbar	Tanjabtim	
1	Inpara 3	657	2.707	858	1.965	4.611	850	987	130	320	5.827	11.418	30.330
2	Ciherang	280	5.175	693	2.821	-	1.697	5.175	15.447	4.683	320	-	36.291
3	Indragiri	-	-	1.779	147	-	1.965	-	-	-	-	-	3.891
4	Inpari 13	-	165	-	-	-	-	-	1.275	635	-	-	2.075
5	Inpari 28 Kerinci	-	-	-	27	249	-	10	2.239	2.055	16	-	4.596
6	Inpari 30 Ciherang sub I	-	-	-	940	445	-	55	356	120	75	-	1.991
7	Batang Plaman	-	-	-	1.063	639	-	90	285	11	-	69	2.157
8	Mekongga	-	349	-	322	889	-	675	797	34	18	4	3.088
9	Cigeulis	-	-	-	-	-	-	-	1.953	24	-	-	1.977
10	PB 42	-	-	-	80	26	51	115	-	-	364	807	1.443
11	Cisokan	-	-	-	53	69	21	71	48	442	1.467	-	2.171
12	IR 64	-	-	-	-	597	148	80	210	198	2.004	-	3.237
13	Lokal	-	-	1.996	4.599	863	4.306	6.154	2.390	1.524	594	5.263	27.689
<b>JUMLAH</b>		<b>937</b>	<b>8.396</b>	<b>5.326</b>	<b>12.017</b>	<b>8.388</b>	<b>9.038</b>	<b>13.412</b>	<b>25.130</b>	<b>10.046</b>	<b>10.685</b>	<b>17.561</b>	<b>120.936</b>

Sumber : Buku Data Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2015)

Tabel 2.9. Data Sebaran Varietas Unggul Jagung Yang Dominan di Provinsi Jambi Tahun 2015

NO	Varietas	Kabupaten/Kota											Total
		Kota Jambi	M.Jambi	Batang Hari	Tebo	Bungo	Sarolangun	Merangin	Kerinci	Sei penuh	Tanjabbar	Tanjabtim	
1	Bisi 2	58	1.100	101	817	210	214	382	196	33	666	929	4.706
2	Bisi 8	-	100	-	-	-	-	63	-	-	21	-	184
3	Bisi 16	-	-	-	-	-	60	328	-	-	-	-	388
4	Bisi 18	-	-	-	-	-	129	-	-	-	-	-	129
5	Bisi 816	-	660	-	-	-	-	-	17	-	-	-	677
6	Bisi 222	-	-	-	119	20	62	1.430	-	-	-	-	1.631
7	N 35	-	384	-	120	26	-	57	3	-	36	201	827
8	N 37	-	47	22	-	368	17	66	11	-	-	-	531
9	NK 99	-	-	-	-	-	-	-	1.871	27	30	-	1.928
10	NK 22	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	25
11	SHS 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	205
12	Bisma	-	48	21	51	134	-	73	64	15	-	-	406
13	Surya	-	-	-	-	-	-	-	10	-	21	-	31
14	Sukmaraga	-	-	-	121	149	-	79	26	22	192	200	789
15	Arjuna	-	-	-	57	-	-	-	-	-	188	-	245
16	Lokal	-	-	12	35	-	16	176	298	13	70	87	707
<b>JUMLAH</b>		<b>58</b>	<b>2.339</b>	<b>156</b>	<b>1.320</b>	<b>907</b>	<b>498</b>	<b>2.654</b>	<b>2.521</b>	<b>110</b>	<b>1.224</b>	<b>1.622</b>	<b>13.409</b>

Sumber : Buku Data Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2015)



Tabel 2.10. Data Sebaran Varietas Unggul Kedelai Yang Dominan di Provinsi Jambi Tahun 2015

NO	Varietas	Kabupaten/Kota										Total	
		Kota Jambi	M.Jambi	Batang Hari	Tebo	Bungo	Sarolangun	Merangin	Kerinci	Sei penuh	Tanjabbar		Tanjatim
1	Anjasmoro	-	60	190	3.454	748	215	867	493	-	85	727	6.839
2	Baluran	-	-	-	50	-	-	18	-	-	-	-	68
3	Gema	-	-	68	32	-	-	-	-	-	-	9	109
4	Grobokan	-	50	-	-	29	-	-	-	-	-	-	79
5	Wilis	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11
6	Argomulyo	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	25
7	Lokal	-	-	-	-	-	8	6	110	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	-	110	258	3.536	802	223	902	603	-	85	736	7.255

Sumber : Buku Data Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2015)

#### d. Institusi Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama/penyakit merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan produksi potensial pertanian tanaman pangan. Upaya ini dilakukan dengan kerja sama antara Dinas, Balai Proteksi Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta kelompok tani.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Indeks Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) merupakan indikasi keuntungan ataukah kerugian yang dialami oleh petani dalam berusahatani, dimana nilai tersebut diperoleh dari indeks yang dibayarkan oleh petani selama masa produksi usaha tani yang dilakukan (ib) dibandingkan dengan indeks yang diterima petani dari hasil usaha taninya (it). Indeks yang dibayarkan petani tersebut dapat mengalami peningkatan apabila harga kebutuhan produksi mengalami kenaikan, dan indeks yang diterima oleh petani juga dapat mengalami penurunan jika terjadi penurunan harga jual hasil usaha taninya. Apabila hal ini terjadi maka petani akan mengalami kerugian yang terlihat pada Indeks Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) jika nilainya < 100, bila nilai tersebut > 100 maka petani memperoleh keuntungan dari usaha taninya.



Pada tahun 2015 Indeks Nilai Tukar Usaha Petani untuk subsektor tanaman pangan (NTUP – Pangan) sebesar 103,53, Nilai Tukar Usaha Petani untuk subsektor hortikultura (NTUP – Hortikultura) sebesar 100,60 dan Nilai Tukar Usaha Petani untuk subsektor peternakan (NTUP – Ternak) sebesar 106,20. Dari tiga sub sektor tersebut yang mengalami keuntungan yang cukup baik adalah pada sub sektor peternakan, sedangkan yang kedua adalah sub sektor tanaman pangan dan terakhir sub sektor hortikultura.

Tabel 2.11. Nilai Tukar Usaha Petani di Provinsi Jambi tahun 2013 – 2015

Tahun	Nilai Tukar Usaha Petani Tanaman Pangan (NTUP-Pangan)	Nilai Tukar Usaha Petani Tanaman Hortikultura (NTUP-Horti)	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP-Ternak)
2013	99,37	100,31	100,29
2014	100,98	100,22	93,48
2015	103,53	100,60	106,20
<b>Rata-rata</b>	<b>97,92</b>	<b>97,53</b>	<b>97,36</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi (2013 – 2015)

#### a. Tanaman Pangan

Berdasarkan Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada Tahun 2015 Provinsi Jambi mengalami penurunan produksi padi jika dibandingkan tahun 2011. Produksi padi Jambi sebesar 485.989 Ton GKG atau mengalami penurunan sebesar 21.031 ton (3.25%). Penurunan produksi padi ini terjadi karena adanya penurunan luas panen sebesar 7.045 Ha (4.47 %), akan tetapi terjadi kenaikan pada produktivitas padi sebesar 0,65 kw/ha (1,58%). Peningkatan produktivitas ini mengindikasikan bahwa petani telah melakukan perbaikan dalam budidaya padi sehingga menghasilkan produksi padi yang cukup tinggi, akan tetapi faktor alam akibat dampak fenomena iklim yang ekstrim menyebabkan petani tidak dapat melakukan usaha tani dengan baik sesuai jadwal tanam yang telah direncanakan yang menyebabkan penurunan luas panen dan produksi padi.



Produksi padi tahun 2015 merupakan produksi terendah selama lima tahun terakhir yang dicapai Provinsi Jambi, walaupun selama lima tahun terakhir produksi padi mengalami fluktuasi, bahkan pada tahun 2012 dan 2014 terjadi penurunan akan tetapi penurunan yang terjadi pada tahun 2015 cukup ekstrim, hal ini disebabkan oleh adanya dampak penomena iklim kemarau yang panjang dan terjadi kebakaran lahan secara masif. Walaupun telah dilakukan upaya antisipasi dan program untuk meningkatkan produksi padi seperti pompa air, pembangunan embung, perbaikan jaringan irigasi, benih unggul dan lain sebagainya, akan tetapi tetap mengalami dampak yang cukup memprihatinkan.

Pada tahun akhir 2015 produksi padi yang dihasilkan terdiri dari padi sawah sebesar 485.989 Ton GKG dan produksi padi ladang sebesar 55.497 Ton GKG. Persentase Laju penurunan produksi padi sawah adalah sebesar 4.58%, sedangkan padi ladang lebih kecil mengalami penurunan yaitu sebesar 3.94 %.



Tabel 2.12. Perkembangan Produksi Padi di Provinsi Jambi (2011 – 2015)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	PERKEMBANGAN	
						2011 s/d 2015	
						(+/-)	(%)
<b>LUAS PANEN (Ha)</b>							
<b>Padi</b>	<b>157.441</b>	<b>149.369</b>	<b>153.243</b>	<b>145.990</b>	<b>122.214</b>	<b>(7.045)</b>	<b>(4,47)</b>
- Padi sawah	132.523	124.443	129.341	121.722	102.207	(6.063)	(4,58)
- Padi ladang	24.918	24.926	23.902	24.268	20.007	(982)	(3,94)
<b>PRODUKSI (TON)</b>							
<b>Padi</b>	<b>646.640</b>	<b>625.164</b>	<b>664.533</b>	<b>664.721</b>	<b>541.486</b>	<b>(21.031)</b>	<b>(3,25)</b>
- Padi sawah	570.552	549.779	589.784	587.384	485.989	(16.913)	(2,96)
- Padi ladang	76.088	75.385	74.749	77.336	55.497	(4.118)	(5,41)
<b>PRODUKTIVITAS (Kw/Ha)</b>							
<b>Padi</b>	<b>41,07</b>	<b>41,85</b>	<b>43,36</b>	<b>45,53</b>	<b>44,31</b>	<b>0,65</b>	<b>1,58</b>
- Padi sawah	43,05	44,18	45,60	48,26	47,55	0,90	2,09
- Padi ladang	30,54	30,24	31,27	31,87	27,74	(0,56)	(1,83)

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2011 – 2015 (data diolah)

Komoditi Jagung berdasarkan Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 terjadi peningkatan produksi jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2011. Perkembangan selama lima tahun terakhir pada komoditi jagung pada akhir tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 5.238 ton pipilan kering (20.52%) jika dibandingkan pada tahun awal 2011. Kenaikan produksi Jagung ini terjadi karena adanya peningkatan Luas panen sebesar 356 Ha (5.31%) dan peningkatan produktivitas sebesar 4.58 Kw/Ha (12.02 %).



Tabel 2.13. Perkembangan Produksi Jagung di Provinsi Jambi (2011 – 2015)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	PERKEMBANGAN	
						2011 s/d 2015	
						(+/-)	(%)
LUAS PANEN (Ha)	6.706	6.587	6.504	7.937	8.486	356	5,31
PRODUKSI (TON)	25.522	25.571	25.690	43.617	51.712	5.238	20,52
PRODUKTIVITAS (Kw/Ha)	38,06	38,82	39,50	54,95	60,94	4,58	12,02

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2011 – 2015 (data diolah)

Komoditi Kedelai akhir Tahun 2015 berdasarkan Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi Kedelai sebesar 6.732 Ton dan ini mengalami peningkatan sebesar 213 Ton atau 3,75 % jika dibandingkan tahun awal 2011. Produksi ini terjadi karena adanya peningkatan luas panen seluas 69 Ha dan adanya peningkatan produktivitas 0,26 Kw/Ha.

Tabel 2.14. Perkembangan Produksi Kedelai di Provinsi Jambi (2011 – 2015)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	PERKEMBANGAN	
						2011 s/d 2015	
						(+/-)	(%)
LUAS PANEN (Ha)	4.563	2.809	1.877	5.288	4.906	69	1,50
PRODUKSI (TON)	5.669	3.516	2.372	6.800	6.732	213	3,75
PRODUKTIVITAS (Kw/Ha)	12,42	12,52	12,64	12,86	13,72	0,26	2,09

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2011 – 2015 (data diolah)



Selain uraian kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di atas, beberapa kinerja UPTD lainnya untuk komoditi tanaman pangan dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15. Perkembangan Pengeluaran Sertifikasi Benih Padi dan Palawija di Provinsi Jambi Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Komoditi (Jumlah lulus sertifikasi)			
		Padi (kg)	Jagung (kg)	Kedelai (kg)	Kacang Tanah (kg)
1	Kota Jambi	1.000	-	-	-
2	Batang Hari	128.870	-	12.810	-
3	Muaro Jambi	47.500	-	8.800	-
4	Bungo	80.570	-	8.000	-
5	tebo	37.500	-	82.500	-
6	Merangin	153.600	-	1.200	1.000
7	Sarolangun	70.945	-	1.650	-
8	Tanjab Barat	137.635	-	-	-
9	Tanjab Timur	337.550	-	11.800	-
10	Kerinci	38.719	-	-	-
11	Sungai penuh	20.000	-	-	-
12	BBI Padi/Palawija	29.445	3.250	5.900	260
	<b>Jumlah</b>	<b>1.083.334</b>	<b>3.250</b>	<b>132.660</b>	<b>1.260</b>

Sumber : Buku Data Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2015)



Tabel 2.16. Luas Serangan dan Luas Pengendalian OPT Pada Tanaman Padi di Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015

No	Jenis OPT	Luas Serangan (Ha)		Pengendalian (Ha)	
		2014	2015	2014	2015
1	Tikus	210,25	360,97	215,15	332,02
2	Penggerek batang	258,01	320,07	234,30	202,50
3	Hama Putih palsu	335,18	325,00	415,77	523,00
4	Walang sangit	296,13	422,20	415,15	470,80
5	Kepinding tanah	67,79	28,17	34,38	37,35
6	lalat daun	38,33	48,12	48,44	54,47
7	burung	320,25	418,30	1.790,31	759,20
8	bercak coklat	88,42	66,32	59,35	9,05
9	belalang	36,73	2,93	36,68	2,25
10	ulat grayak	52,79	17,40	64,20	23,97
11	wereng coklat	33,19	40,16	35,00	43,40
12	blast	95,28	140,40	110,03	148,00
13	keong mas	74,98	82,40	86,22	115,30
14	orong-orong	25,85	27,90	46,13	29,96
15	bakteri hawar	41,45	396,80	57,18	183,90
<b>Jumlah</b>		<b>1.974,63</b>	<b>2.697,14</b>	<b>3.648,29</b>	<b>2.935,17</b>

Sumber : Buku Data Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2015)

Tabel 2.17. Luas Serangan dan Luas Pengendalian OPT Pada Tanaman Jagung di Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015

No	Jenis OPT	Luas Serangan (Ha)		Pengendalian (Ha)	
		2014	2015	2014	2015
1	Penggerek tongkol	15,76	20,51	18,53	35,37
2	bercak daun	8,69	24,59	3,04	47,67
3	penggulung daun	4,04	4,81	0,70	9,65
4	ulat daun	7,50	2,46	1,57	8,45
5	lalat bibit	4,40	7,68	4,14	12,63
6	ulat grayak	22,03	8,71	9,76	24,90
7	babi	13,17	17,61	3,44	114,00
8	belalang	26,70	27,63	27,16	66,08
9	penggerek batang	5,88	2,25	2,72	7,93
10	tikus	0,04	8,70	0,05	26,65
11	bulai	4,49	4,58	4,92	4,75
12	hawar daun	8,06	4,68	8,73	8,22
<b>Jumlah</b>		<b>120,76</b>	<b>134,21</b>	<b>84,76</b>	<b>366,30</b>

Sumber : Buku Data Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2015)



Tabel 2.18. Luas Serangan dan Luas Pengendalian OPT Pada Tanaman Kedelai di Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015

No	Jenis OPT	Luas Serangan (Ha)		Pengendalian (Ha)	
		2014	2015	2014	2015
1	Penggulung daun	22,63	46,19	17,51	66,79
2	ulat grayak	14,84	18,20	3,40	19,37
3	lalat bibit	7,58	0,65	2,56	1,10
4	penggerek polong	2,77	2,01	2,91	2,54
5	ulat daun	8,87	2,25	6,37	1,48
6	karat daun	3,57	-	1,53	-
7	lalat kacang	6,22	9,53	7,34	13,86
8	kepek	7,07	0,08	6,70	7,11
9	belalang	4,92	11,23	1,63	15,73
	<b>Jumlah</b>	<b>78,47</b>	<b>90,14</b>	<b>49,95</b>	<b>127,98</b>

Sumber : Buku Data Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2015)

#### b. Tanaman Hortikultura

Hortikultura merupakan kelompok komoditas yang terdiri dari aneka jenis buah-buahan, aneka sayuran, aneka tanaman hias dan aneka tanaman obat-obatan, meskipun bagi masyarakat awam hortikultura sering diidentifikasi sebagai buah-buahan dan sayuran apa saja karena dua komoditas inilah yang memang banyak dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral.

Rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap buah dan sayuran sangat erat kaitannya dengan masih rendahnya produksi maupun kurangnya kesadaran masyarakat akan gizi sebagai akibat budaya pola makan yang kurang baik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar produk hortikultura khususnya buah-buahan masih merupakan hasil alami dan bukan dari upaya pembudidayaan yang baik, sehingga wajar jika penyediaannya sangat terbatas.



Dalam pengembangan komoditas hortikultura sebagai upaya meningkatkan pendapatan petani beserta keluarganya perlu terus digalakkan, mengingat komoditas ini memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya serta berpeluang besar untuk dikembangkan dalam system agribisnis.

Komoditas hortikultura yang dikelola secara agribisnis dinilai sangat menjanjikan terhadap upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani hortikultura. Pasar produk hortikultura baik didalam maupun diluar negeri masih terbuka lebar, disamping kontinuitas permintaan produk juga semakin meningkat.

Didalam negeri produk hortikultura Indonesia kalah bersaing dengan produk hortikultura impor yang membanjiri super market, bahkan kini merambah hingga pasar-pasar tradisional. Disisi lain ekspor produk hortikultura kita banyak yang ditolak oleh negara negara tujuan sebagai akibat adanya kandungan pestisida dan hama penyakit. Keadaan ini berakibat pada posisi tawar petani selalu berada pada kondisi yang tidak menguntungkan.

Dengan masuknya era pasar bebas yang berarti banjirnya berbagai produk pertanian dari luar negeri, serta semakin meningkatnya tingkat pendapatan penduduk, telah memacu permintaan produk pertanian khususnya buah-buahan yang berkualitas dalam jumlah yang memadai dan berkesinambungan sebagai akibat dari keadaan ini menuntut kesiapan kita dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang diperlukan untuk menanggulangnya.



Secara umum usahatani hortikultura belum banyak mengadopsi teknologi tepat guna yang tersedia, yang disebabkan rendahnya kesadaran dan kemampuan petani dalam melaksanakan kegiatan agribisnis secara menyeluruh. Sementara itu, wilayah Sumatera termasuk Jambi memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan agribisnis hortikultura. Dengan dukungan agro-ekologi dan agroklimat yang sangat sesuai untuk usahatani hortikultura, maka Jambi merupakan salah satu wilayah andalan produsen komoditi hortikultura.

Potensi Jambi dapat mengangkat citra hortikultura Jambi baik ditingkat nasional, regional maupun internasional dan secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pembagian penggunaan lahan dikelompokkan untuk sawah seluas 209.287 Ha dan Lahan Kering yang merupakan lahan terbesar yaitu 4.890.713 Ha. Potensi lahan kering inilah yang perlu digarap untuk pengembangan sentra-sentra hortikultura.
2. Wilayah Provinsi Jambi umumnya bertipe iklim basah yang memungkinkan tumbuhnya aneka komoditas hortikultura tropika unggulan seperti manggis, durian, jeruk, pisang, nenas dan berbagai sayuran, tanaman hias serta obat-obatan.
3. Tersedianya sentra-sentra hortikultura tradisional rakyat spesifik lokalita yang keunggulannya telah dikenal masyarakat baik dalam provinsi maupun luar provinsi.
4. Tersedianya komoditas potensi untuk dikembangkan berupa plasma nutfah unggulan daerah yang telah dilepas dan wajib dikembangkan.
5. Pengembangan sentra-sentra hortikultura yang difasilitasi pemerintah dalam rangka memberikan kontribusi terhadap penyediaan produk hortikultura Provinsi Jambi.



6. Mulai tumbuh kembangnya agroindustri skala rumah tangga telah menjadi pendorong dalam pengembangan hortikultura di Provinsi Jambi.
7. Berkembangnya pasar swalayan di Jambi menuntut pasokan komoditas hortikultura yang berkualitas.

Dilihat dari perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir, luas panen, produktivitas dan produksi komodity sayur – sayuran (Bawang merah, kentang dan cabe) dan buah – buhan sangat bervariasi. Hal ini sangat tergantung dengan kondisi iklim yang terjadi. Buah – buhan (Durian, Duku dan rambutan) yang merupakan tanaman tahunan yang berdasarkan fisiologinya akan berbuah setiap tahun, ternyata di lapangan tidak dan berbuah dan menghasilkan setiap tahunnya. Hal ini bisa diamati terhadap data produksi sayur-sayuran dan buah – buhan yang ada di provinsi Jambi. (Tabel 2.19 dan 2.20)

Tabel 2.19. Perkembangan Produksi Bawang Merah, Kentang dan Cabe di Provinsi Jambi (2011 – 2015)



NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	<b>Bawang Merah</b>					
	- Luas Panen ( Ha )	803	769	213	628	527
	- Produktivitas ( Ton/Ha )	99,54	87,92	47,44	77,00	74,69
	- Produksi (Ton)	7.993	6.761	1.010	4.836	3.936
2	<b>Cabe</b>					
	- Luas Panen ( Ha )	3.080	1.859	3.477	4.738	3.423
	- Produktivitas ( Ton/Ha )	76,39	56,61	112,32	77,49	88,64
	- Produksi (Ton)	23.527	10.523	39.055	36.715	30.342
3	<b>Kentang</b>					
	- Luas Panen ( Ha )	4.954	4.599	4.527	8.879	6.147
	- Produktivitas ( Ton/Ha )	179,86	185,99	166,80	216,12	183,91
	- Produksi (Ton)	89.101	85.535	75.512	191.890	113.051

Tabel 2.20. Perkembangan Produksi Buah-buahan Unggulan Daerah  
(Durian, Duku dan jeruk) di Provinsi Jambi (2010 – 2015)



NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>Durian</b>					
	- Luas Panen ( Ha )	1.528	2.073	1.027	952	865
	- Produktivitas ( Ton/Ha )	10,92	15,81	11,83	23,60	18,66
	- Produksi (Ton)	16.693	32.768	12.147	22.475	16.141
<b>2</b>	<b>Duku</b>					
	- Luas Panen ( Ha )	1.536	2.033	753	786	1.119
	- Produktivitas ( Ton/Ha )	6,31	11,17	14,96	18,85	16,11
	- Produksi (Ton)	9.687	22.695	11.262	14.808	18.033
<b>3</b>	<b>Jeruk</b>					
	- Luas Panen ( Ha )	3.934	3.488	301	423	387
	- Produktivitas ( Ton/Ha )	111,36	9,52	38,09	35,90	34,60
	- Produksi (Ton)	438.115	33.199	11.459	15.196	13.405

Tabel 2.21. Luas Serangan dan Luas Pengendalian OPT Pada Tanaman Cabai di Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015



No	Jenis OPT	Luas Serangan (Ha)		Pengendalian (Ha)	
		2014	2015	2014	2015
1	Antraknosa	37,75	6,74	205,86	8,99
2	Bercak daun	2,58	9,93	4,37	10,74
3	Virus keriting	11,6	3,15	9,35	4,08
4	Virus kuning	40,58	90,77	40,53	10,63
5	Layu fusarium	1,28	2,2	0,98	3,96
6	Trips	52,36	37,22	96,1	60,53
7	Tungau	2,48	5,16	5,64	9,16
8	Kutu daun	39,61	72,25	125,76	156,52
9	ulat grayak	0,94	5,25	14,46	13,60
10	Lalat buah	43,06	15,94	82,15	17,69
	Jumlah	232,24	248,61	585,20	295,90

Sumber : Buku Data Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi (2015)

### c. Peternakan

Peran sub sektor peternakan sebagai salah satu faktor pengungkit (*leverage*) dan penggerak (*mover*) kemajuan pembangunan daerah dapat dilihat dari peranannya dalam struktur perekonomian Provinsi Jambi saat ini. Peran sub sektor peternakan dalam pembangunan di Provinsi Jambi dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor peternakan dan kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian dan PDRB Provinsi Jambi sebagaimana disajikan pada tabel 2.22 berikut ini.

Tabel 2.22. Peran Subsektor Peternakan dalam PDRB Provinsi Jambi  
(Berdasarkan Harga Konstan)



Tahun	Peternakan (Rp milyar)	Kontribusi terhadap	
		Pertanian (%)	Total (%)
2011	1.224	24,74	4,96
2012	1.290	26,42	4,88
2013	1.357	28,83	4,83
2014	1.399	31,14	4,49
2015	1.574	32,81	4,79
<b>Pertumbuhan (%)</b>	<b>6,03%</b>		

Secara umum dapat dilihat bahwa nilai PDRB pada lapangan usaha peternakan dan hasil-hasilnya di Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6,03 % per tahun. Kontribusi PDRB bidang peternakan terhadap pertanian setiap tahunnya meningkat, hanya saja pertumbuhan ini tidak berimbang dengan laju pertumbuhan PDRB total Provinsi Jambi karena PDRB peternakan terhadap PDRB total provinsi Jambi cenderung menurun setiap tahunnya.

Peran sub sektor peternakan dalam pembangunan di Provinsi Jambi dapat dilihat dari perkembangan populasi ternak di wilayah ini. Secara umum populasi ternak di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hanya saja populasi yang ada ini belum mampu memenuhi kebutuhan permintaan daerah sehingga masih diperlukan pemasukan ternak dari luar provinsi. Pada tabel 2.23



disajikan data mengenai populasi, pemasukan dan pengeluaran ternak di Provinsi Jambi pada tahun 2016 serta perkembangan populasi ternak selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.23. Perkembangan Populasi Ternak di Provinsi Jambi

Jenis Ternak	Keadaan tahun 2016			Perkembangan Populasi Lima Tahun Terakhir (%)
	Populasi (Ekor)	Pemasukan (Ekor)	Pengeluaran (Ekor)	
Sapi potong	153.220	31.244	19.312	↑ 21,75
Kerbau	43.602	10.517	1.280	↓ 6,73
Kambing	449.434	24.411	29.611	↑ 17,38
Domba	79.793	1.467	1.192	↑ 17,73
Babi	26.071	8	-	↑ 17,38
Ayam Buras	13.756.925	929.306	6.866	↓ 22,73
Itik	1.497.261	503.215	2.300	↑ 17,38
Ayam Broiler	13.295.474	104.564.676	105.262.181	↑ 17,38
Ayam Layer	645.224	503.215	61.189	↑ 17,38

Guna mendukung kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Jambi maka melalui Dinas Tanaman Pangan,



Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah dialokasikan anggaran melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Jambi. Selain itu juga didukung oleh anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta anggaran Kabupaten/Kota. Dari aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi juga dihasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari usaha dan pemanfaatan asset yang ada. PAD yang diperoleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi antara lain diperoleh dari penjualan ternak tidak layak bibit, ternak penggemukan, retribusi kebun binatang dan pelayanan jasa laboratorium. Pada tabel 2.24 disajikan data alokasi APBD Provinsi Jambi untuk belanja langsung serta PAD yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.24. Perkembangan APBD dan PAD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi



Tahun	APBD (Rp)	PAD (Rp)
2011	10.113.000.000	1.245.190.500
2012	11.785.709.500	1.103.487.300
2013	31.844.185.775	1.769.540.000
2014	29.988.224.727	1.821.766.500
2015	23.865.933.000	2.496.504.500

Pemanfaatan anggaran pemerintah sejauh ini belum sepenuhnya efektif untuk mendukung pelayanan pengembangan peternakan dan pembinaan kesehatan hewan di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan karena sebagian dari anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan ternak, terutama untuk ternak sapi potong. Kebijakan ini diambil untuk memacu peningkatan populasi sapi potong di Provinsi Jambi, yang saat ini masih sangat rendah. Sementara itu ketersediaan kredit lunak dari sumber permodalan komersial untuk pengadaan bibit ternak masih sangat terbatas sehingga pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pengadaan ternak

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### 1). Tantangan



Pembangunan subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi dihadapkan pada beberapa tantangan antara lain adalah terbatasnya lahan untuk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; sarana dan prasarana belum menjamin aksesibilitas; penurunan kapasitas dan mutu sumber daya lahan air; kurangnya minat generasi muda untuk bertani dan beternak; serta tingginya resiko tertular penyakit hewan menular.

Setiap tahun lahan-lahan potensi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ada yang beralih ke penggunaan lainnya, sehingga luas baku lahan pertanian cenderung akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena tidak ada regulasi seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang memberikan ruang khusus untuk pertanian. Akibatnya, sering kawasan pertanian terusir untuk kepentingan nonpertanian.

Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti sarana produksi pertanian, sarana teknologi, sarana transportasi dan lain sebagainya menjadi faktor penghambat dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Selain itu, pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dihadapkan pada penurunan kapasitas dan mutu sumber daya lahan dan air. Disisi lain kurangnya minat generasi muda yang bekerja di sektor pertanian menjadi tantangan tersendiri dan apabila ini tidak diantisipasi di masa mendatang, pembangunan sektor pertanian akan menghadapi masalah, terutama dalam mendorong aktivitas agribisnis di pedesaan.

Untuk sektor peternakan terdapat tantangan lain dalam peningkatan populasi ternak yaitu tingginya resiko tertular penyakit hewan menular, karena Provinsi Jambi termasuk wilayah yang rawan tertular penyakit dari Provinsi lain karena merupakan daerah lalu lintas ternak antar Provinsi.



Kondisi tersebut mengandung konsekuensi tindakan pencegahan dini terhadap kemungkinan timbulnya penyakit menular dari wilayah lain.

## 2). Peluang

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ada terdapat peluang – peluang antara lain :

### **a. Potensi sumber daya alam**

Peluang pengembangan lahan pertanian di Provinsi Jambi masih cukup besar tersedia yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penambahan baku lahan pertanian. Saat ini areal pertanian dan lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal masih ada, seperti lahan kering dan lahan rawa pasang surut/lebak serta peningkatan intensitas pertanaman (IP) pada lahan beririgasi. Potensi sumber daya ini perlu dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat pertanian terutama tanaman pangan dan hortikultura. Kondisi lahan yang secara umum subur, iklim yang mendukung ketersediaan air (hujan) hampir sepanjang waktu merupakan peluang yang sangat menguntungkan untuk pembangunan tanaman pangan.

Disamping itu, Provinsi Jambi masih kaya dengan keanekaragaman hayati pangan. Dengan kondisi tersebut, terdapat ribuan jenis sumber daya hayati tanaman yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai sumber pangan. Selain dimanfaatkan langsung sebagai sumber pangan, keanekaragaman hayati tanaman yang ada dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai bahan pembentukan varietas unggul tanaman pangan. Untuk sektor peternakan terdapat itik kerinci yang merupakan satu-satunya plasma nutfah ternak yang ada di Provinsi Jambi dan telah diakui oleh Pusat, ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 2834/Kpts/LB/08/2012.



Keberadaan itik kerinci menyebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci dimana populasi terbesar berada di Kecamatan Air Hangat, atas dasar tersebut Kecamatan Air Hangat, tepatnya di Desa Kotomajidin ditetapkan sebagai Sentra Pengembangan Ternak Itik Kerinci

#### ***b. Teknologi***

Pemanfaatan teknologi tepat guna sampai saat ini belum sepenuhnya diterapkan karena masih rendahnya modal petani, masih terbatasnya akses petani terhadap lembaga permodalan, masih relatif rendahnya SDM petani. Hal ini menyebabkan produktivitas dan pertumbuhan sektor pertanian rendah. Introduksi teknologi tepat guna harus terus menerus dikembangkan agar pertanian mampu menjadi sektor andalan dan penggerak pembangunan.

#### ***c. Peningkatan Permintaan Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan***

Pasar domestik sangat berpotensi untuk pemasaran produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dan cenderung meningkat terus akibat pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita penduduk disertai dengan peningkatan jumlah dan struktur penduduk, akan meningkatkan penyerapan produk-produk pertanian.

Penggunaan produk pertanian semakin beragam, tidak saja untuk konsumsi langsung dan ekspor tetapi juga sebagai bahan baku industri. Diversifikasi penggunaan produk mendorong peningkatan permintaan terhadap produk-produk olahan pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah, daya saing dan tumbuhnya industri hilir di pedesaan. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas juga berpeluang untuk memasarkan produk pertanian di pasar internasional.



#### ***d. Tenaga Kerja***

Ketersediaan tenaga untuk pembangunan pertanian di Provinsi Jambi relatif masih tersedia jumlahnya dan masih murah. Dengan lambatnya pertumbuhan sektor industri dan jasa yang menyebabkan masih terdapat limpahan tenaga kerja di sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Pemanfaatan secara optimal jumlah dan murahannya upah tenaga kerja yang ada merupakan peluang untuk meningkatkan pembangunan tanaman pangan.

#### ***e. Investasi***

Insentif investasi dalam kegiatan agribisnis belum mencukupi terutama yang berkaitan dengan kebijakan makro ekonomi dan besarnya resiko dibidang agribisnis. Apabila diberikan kompensasi atas resiko yang berkaitan sifat-sifat alamiah produk pertanian yang mempunyai tingkat ketergantungan tinggi terhadap alam, musiman dan mudah rusak, maka minat investasi dibidang pertanian dapat meningkat. Untuk itu investasi Pemerintah daerah perlu sebagai langkah awal dalam mempercepat pembangunan pertanian di daerah



# BAB 3

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Tugas pokok Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi sesuai peraturan yang berlaku. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas meliputi urusan bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan disajikan pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Urusan SKPD

No	Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	Permasalahan
1	Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.	Perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan (perencanaan dan pelaksanaan) masih kurang optimal dikarenakan Tugas dan fungsi yang terlalu besar dan luas dengan struktur organisasi yang padat sehingga kurang terpadu antar bidang dalam perumusan kebijakan akibat masih adanya egosektoral dan kepentingan yang tidak sejalan.



2	Penyelenggaraan urusan bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Kurangnya anggaran dan pembiayaan, sarana dan prasarana yang belum menjamin aksesibilitas, alih fungsi lahan pertanian, penurunan kapasitas dan mutu sumber daya lahan dan air, tingginya resiko penularan penyakit hewan menular.
3	Pembinaan dan pelaksanaan tugas	Kurangnya keterampilan aparat, keterbatasan pelaksana teknis lapangan.

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Mencermati Visi serta Misi Gubernur Jambi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, dimana Visi nya adalah “JAMBI TUNTAS 2021 (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera).” Mengacu pada tugas dan fungsinya, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan akan mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur Jambi terutama di Misi Keempat yaitu “Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.”

Melalui misi keempat tersebut, ditetapkan 2 (dua) Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 terutama pada tujuan kedua yaitu Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja terinci pada Tabel 3.2 berikut ini.



Tabel. 3.2. Matrik Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal	Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal	Peningkatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
		Meningkatkan akses terhadap bahan pangan	Stabilisasi harga pangan (gabah/beras) tingkat produsen
		Meningkatkan mutu dan keamanan pangan asal sayur dan buah	Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang
		Meningkatkan produksi dan produktivitas produk pertanian	Peningkatan pengawasan keamanan, mutu dan higienis pangan asal buah dan sayuran
		Meningkatkan produksi dan produktivitas produk pertanian, peternakan dan perikanan berbasis IPTEKIN	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian, peternakan dan perikanan berbasis IPTEKIN
	Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan	Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan sarana prasarana tehnologi pertanian	Fasilitasi penerapan teknologi pertanian dan sarana prasarana tehnologi pertanian
		Meningkatkan penyediaan sarana produksi dan bibit unggul pertanian di perdesaan	Memfasilitasi sarana produksi dan bibit unggul pertanian bagi petani di perdesaan

Program-program yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi merupakan program yang akan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan program Gubernur Jambi. Matriks Telaah Visi Misi Gubernur beserta faktor penghambat dan faktor pendorong tersaji pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi



Visi : Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera			
Misi : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan			
Sasaran Misi Gubernur dalam Bidang Pertanian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
Tujuan: Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian			
Meningkatnya kemandirian Pangan Berbasis Sumber Pangan Lokal	Kurangnya anggaran dan pembiayaan	Keterbatasan sarana dan prasarana yang belum menjamin aksesibilitas	Koordinasi lintas institusi baik secara horizontal (antar OPD Pemprov dan lembaga swasta) dan secara vertikal) mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas.
	Kurangnya pemanfaatan teknologi dan Sumber Daya Alam yang ada.	Kurangnya kualitas sumber daya aparatur.	Dukungan sumber daya instistusi baik pemerintah maupun swasta dalam pemanfaatan teknologi dan sumber daya alam Pemanfaatan PPL dalam peningkatan pengetahuan petani .
Meningkatnya Indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan	Kurangnya ketersediaan lahan	Alih fungsi lahan yang tidak bisa diimbangi dengan cetak lahan baru. Lemahnya Status dan Kecilnya Luas Penguasaan Lahan serta Tekanan Degradasi.	Perda Provinsi Jambi No. 10/2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013 – 2033. Upaya program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



### **3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA**

#### **VISI KEMENTERIAN PERTANIAN**

Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani.

#### **MISI KEMENTERIAN PERTANIAN**

1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis IPTEK dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.
2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.
3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pelayannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan IPTEK dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.
5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.
6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.
7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.



8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.
9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas
10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional

#### **TUJUAN**

1. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal
2. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.
3. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi disusun berdasarkan analisis strategi atas potensi, peluang, tantangan dan permasalahan termasuk isu strategis yang dihadapi selama proses pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan lima tahun ke depan dengan mengkomodir sebagian Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 yang berkaitan dengan Pembangunan Pertanian Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi. Matriks Telaah terhadap Renstra Kementerian Pertanian beserta faktor penghambat dan faktor pendorong tersaji pada tabel 3.4 berikut ini.



Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Kurangnya ketersediaan lahan	Alih fungsi lahan yang tidak bisa diimbangi dengan cetak lahan baru. Lemahnya Status dan Kecilnya Luas Penguasaan Lahan serta Tekanan Degradasi.	UU no 41/ 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	Penurunan kapasitas dan mutu sumber daya lahan dan air	Dampak Perubahan Iklim Terhadap Penurunan Produksi Pertanian. Terbatasnya Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Air Pertanian. Kurangnya penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah.	Potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Peningkatan Diversifikasi Pangan.	Masih Tingginya Ketergantungan Masyarakat akan Beras	Belum Berjalannya Diversifikasi Pangan dengan Baik.	Sudah cukup banyaknya tersedia paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan kapasitas produksi aneka produk pertanian. Potensi sumber daya alam yang melimpah
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Kesenjangan produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang dihasilkan, dibandingkan dengan potensi produktivitas.	Kuantitas dan Kualitas Produk Pertanian Belum Mendukung Berkembangnya Agroindustri. Lemahnya Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Penyuluh. Tekanan Globalisasi Pasar dan Liberalisasi Perdagangan Kebijakan Fiskal dan Moneter Belum Mendukung Berkembangnya Usaha Pertanian.	Dukungan sumber daya instistusi baik pemerintah maupun swasta dalam pemanfaatan tehnologi dan sumber daya alam



<b>Peningkatan Kesejahteraan Petani.</b>	Rendahnya Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP).	Terbatasnya Akses Petani Terhadap Sumber Permodalan. Sarana dan prasarana belum menjamin aksesibilitas.	Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki kultur budaya kerja keras, sesungguhnya merupakan potensi tenaga kerja untuk mendukung pengembangan pertanian.
--	--	---	--

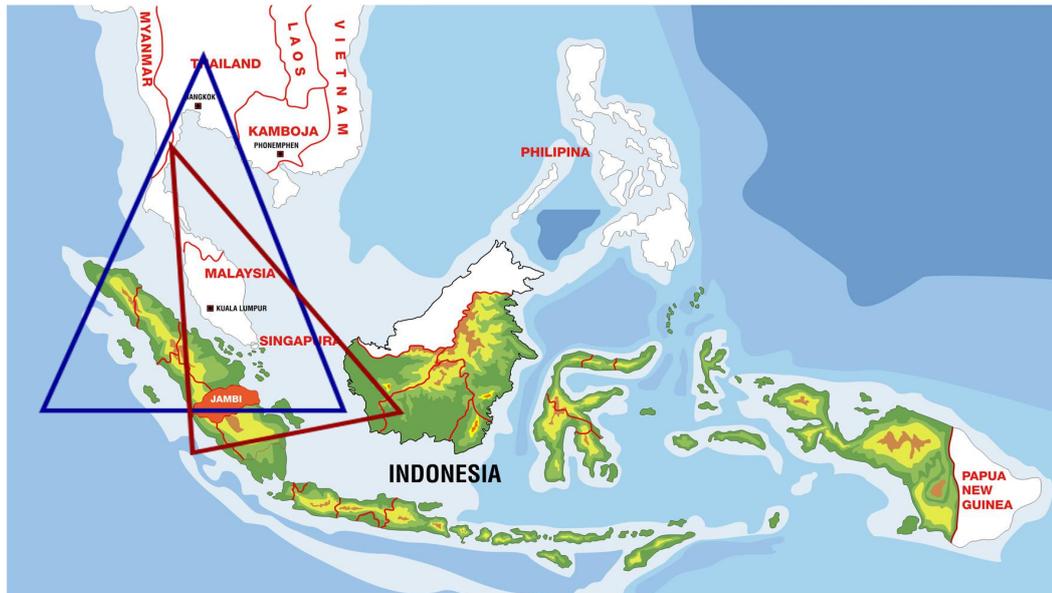
Program-program yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi merupakan implementasi dari sebagian program yang ada pada Kementerian Pertanian serta nantinya akan dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang berlokasi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Dengan demikian terdapat urutan program dan kegiatan yang saling berhubungan mulai dari kementerian Pertanian hingga ke Kabupaten/Kota.

### **3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI**

#### **KAJIAN RTRW**

Propinsi Jambi termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Jarak tempuh Jambi ke Singapura jalur laut melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (*jet-foil*) ditempuh ± 5 jam (seperti yang terlihat pada gambaran peta di bawah).





Gambar 1. Segi Tiga Pertumbuhan ISM - GT

Menurut PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan pertanian adalah (1) memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian; (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi; (3) mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau (4) dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air. Di Provinsi Jambi, kawasan peruntukan pertanian menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013 – 2033 meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan.

#### 1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

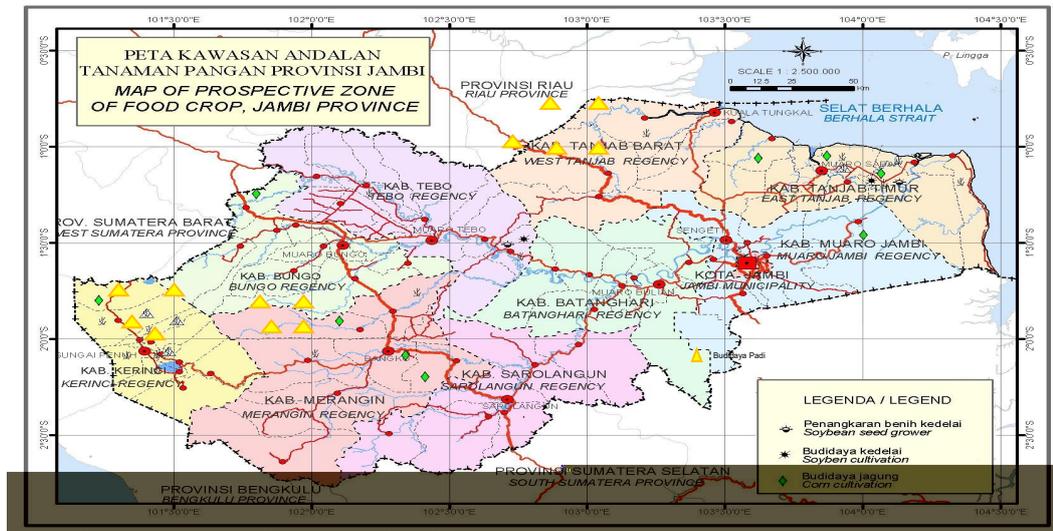
Lokasi pertanian tanaman pangan terdiri dari pertanian tanaman lahan basah dan pertanian tanaman lahan kering. Pertanian tanaman pangan lahan basah di Provinsi Jambi yang jumlah luasan lebih kurang 3 % dari luas wilayah daratan meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten MUaro Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Arah

Pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan lahan basah meliputi (1) perluasan areal persawahan baru (ekstensifikasi); (2) perbaikan sistem irigasi yang sebelumnya hanya mampu mengairi sawah sekali masa tanam per tahun menjadi dua kali masa tanam per tahun (3) Perbaikan kawasan tangkapan air (catchment area) dari satuan wilayah sungai sehingga air untuk kebutuhan irigasi dapat terpenuhi; (4) Mempertahankan lahan basah pertanian yang beririgasi untuk tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian; (5) Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian subur.

Untuk pertanian tanaman pangan lahan kering yang jumlah luasannya lebih kurang 6 % dari luas wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Arahannya meliputi (1) Pengembangan kawasan-kawasan potensial untuk pertanian tanaman pangan lahan kering; (2) Mempertahankan luas lahan tanaman pangan lahan kering yang ada serta melakukan perluasan ke daerah yang masih memungkinkan sesuai dengan arahan pada RTRW kabupaten bersangkutan; (3) Mengembangkan pertanian lahan kering rakyat terutama untuk komoditi yang produktivitasnya tinggi sebagai komoditi yang berorientasi ekspor; (4) Pengendalian perluasan tanaman untuk memelihara kelestarian lingkungan; (5) diversifikasi tanaman terutama komoditi buah-buahan untuk mendukung perkembangan sistem sekunder; (6) menciptakan keterkaitan antar petani rakyat dengan sistem sekunder.

Kawasan pertanian pangan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan jumlah luasannya lebih kurang 4 % dari luas wilayah daratan.

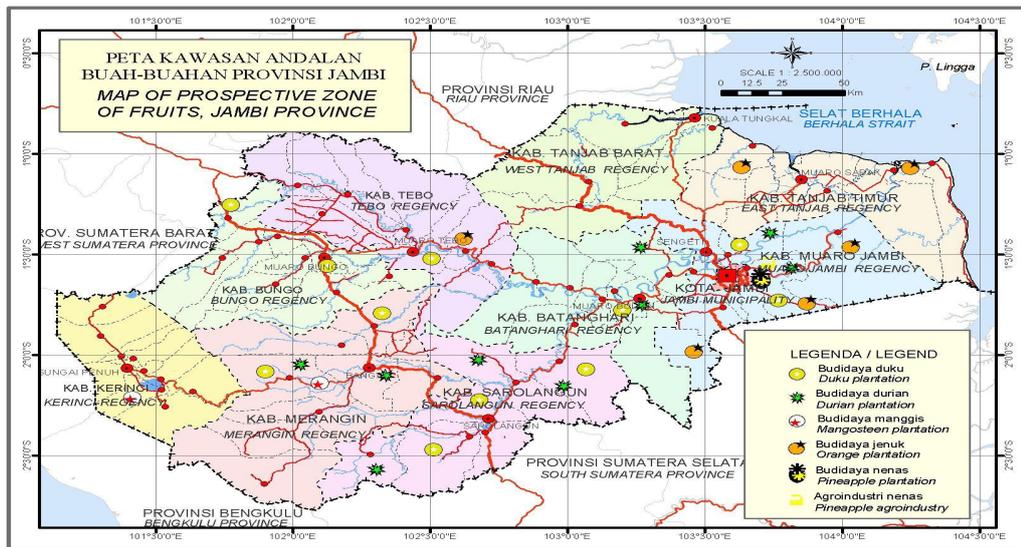




Gambar 2. Peta Pembagian Wilayah Kawasan Tanaman Pangan

## 2. Kawasan Hortikultura

Pengembangan kawasan Hortikultura di Provinsi Jambi terdapat di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kota Sungai Penuh.



Gambar 3. Peta Pembagian Wilayah Kawasan Tanaman Hortikultura



### 3. Kawasan Peternakan

Lokasi pengembangan peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian baik lahan basah, lahan kering maupun kebun campuran dikembangkang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten MUaro Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Kerinci.

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Penetapan kawasan-kawasan potensial sebagai kawasan lindung dan kawasan pengembangan budidaya pertanian/non pertanian	<p><i>Sebagai Perencana Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi</i></p> <p>Adanya kebijakan/program-program baru yang mengharuskan struktur ruang yang telah disusun harus direvisi kembali.</p> <p>Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dengan pihak yang mempunyai kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang.</p>	<p>Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan tata ruang.</p> <p>Terbatasnya SDM perencana yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang.</p> <p>Adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Usulan Perubahan Kawasan Hutan.</p>	<p>Adanya UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.</p> <p>Adanya bantuan dari Fungsi Bappeda sebagai Tim BKPRD yang mempunyai kewenangan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang wilayah</p>



	<i>Sebagai Pengguna Dokumen RTRW</i>		
	Dokumen RTRW masih bersifat umum sehingga perlu diderivasi ke dalam Rencana Detail Tata Ruang. Masih kurangnya sosialisasi RTRW sehingga masih banyak stakeholder yang belum mengetahuinya.	RTRW Provinsi Jambi yang seharusnya menjadi acuan didalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.	Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melakukan evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan yang menggunakan ruang. Adanya peraturan penyusunan dokumen perencanaan yang harus mengacu kepada RTRW.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Isu-isu strategis yang menjadi acuan dan dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Isu strategis berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

#### A. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan fokus menilai dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang akan mempengaruhi kinerja Dinas. Lingkungan internal terdiri dari komponen atau variabel lingkungan yang berasal atau berada di dalam jangkauan intervensi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Karena sifatnya yang berasal dari dalam maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi lebih memiliki *bargain value*



untuk berkompromi atau menyasiasi komponen yang berada di dalam lingkungan internal.

Faktor kekuatan adalah bagian dari faktor strategis internal, dianggap sebagai kekuatan karena dapat mendukung Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam pelayanan pengembangan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Oleh karena itu faktor kekuatan harus dimanfaatkan secara maksimal. Faktor kekuatan utama yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat dalam pengembangan peternakan dan pembinaan kesehatan hewan kepada masyarakat adalah:

1) Koordinasi lintas institusi

Dalam melaksanakan pelayanan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi telah memiliki jalinan kerjasama yang cukup baik dengan sejumlah institusi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kerjasama yang baik tersebut telah dijalin baik secara vertikal Kementerian Pertanian dan OPD teknis Kabupaten/Kota maupun secara horizontal dengan jajaran OPD Pemerintah Provinsi Jambi serta sejumlah lembaga swasta yang terkait. Sejauh ini kerjasama lintas institusi tersebut telah banyak membantu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2) Jumlah sumber daya aparatur

Dengan jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 420 orang dengan pendidikan sebagian besar adalah sarjana maka sumberdaya aparatur yang cukup banyak ini menjadi modal yang sangat kuat bagi



Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- 3) Jumlah keanekaragaman produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

Keragaman produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang makin bervariasi sehingga akan membuka peluang yang lebih besar terhadap diversifikasi produk. Diversifikasi penggunaan produk mendorong peningkatan terhadap produk-produk olahan pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah, daya saing dan tumbuhnya industri hilir.

- 4) Bertambahnya jumlah PPL

Dengan penggabungan Badan Koordinasi Penyuluhan kedalam Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menambah jumlah Petugas Penyuluh Lapangan untuk menunjang fungsi pelayanan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Hasil analisis terhadap factor kekuatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi seperti disajikan pada tabel 2.25 berikut ini.



Tabel 3.6. Matrik Analisis Faktor Kekuatan

Komponen Kekuatan	Bobot	Nilai	Tertimbang
1. Koordinasi lintas institusi	40	3	120
2. Jumlah Sumberdaya Aparatur	15	3	45
3. Keanekaragaman produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	30	4	120
4. Bertambahnya jumlah PPL	15	4	60
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>		<b>345</b>

Faktor kelemahan adalah bagian dari faktor strategis internal. Faktor tersebut dianggap sebagai kelemahan karena akan menjadi penghambat bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan pelayanan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Dalam peningkatan pelayanannya maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi harus mampu meminimalkan pengaruh faktor ini, yaitu:

- 1) Kurangnya anggaran dan pembiayaan

Dengan penggabungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Badan Koordinasi Penyuluhan memberi pengaruh terhadap tugas dan fungsi yang menjadi terlalu besar dan luas dengan struktur organisasi yang padat sehingga menjadi kurang efektif. Selain itu, efek lain dari penggabungan organisasi adalah pengurangan anggaran dan pembiayaan sehingga beberapa fungsi organisasi berjalan tidak sebagaimana mestinya.



## 2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pelayanan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terutama untuk penunjang operasional lapangan masih sangat terbatas. Sarana dan prasarana teknis seperti kendaraan operasional petugas teknis, puskesmas, obat-obatan ternak, alsintan, bibit, pupuk masih dirasakan kurang baik jumlah maupun kualitasnya. Keterbatasan ini menjadikan pelayanan pengembangan dan pembinaan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

## 3) Pelaksana Teknis Lapangan

Sejauh ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tidak memiliki aparatur petugas teknis yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pelayanan yang ada di lapangan. Petugas teknis yang membantu pemberian pelayanan pengembangan dan pembinaan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan adalah aparatur kabupaten/kota, yang tidak bertanggungjawab secara langsung kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Ketiadaan pelaksana teknis lapangan ini mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam pemberian pelayanan kepada petani/peternak serta kurang terpantaunya program yang ada secara berkelanjutan.

## 4) Mutu Sumberdaya Aparatur

Sungguhpun dari aspek jumlah, sumberdaya aparatur pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sudah cukup memadai tetapi dari aspek kualitas masih memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Sebagai OPD tingkat provinsi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan membutuhkan aparatur yang mampu



berperan sebagai konseptor dalam menyusun berbagai acuan pelaksanaan, sebagai jabaran dari pedoman yang telah disusun oleh lembaga yang lebih tinggi. Dari pengalaman selama ini ternyata tidak banyak aparatur yang memiliki kemampuan untuk itu. Sejauh ini sebagian besar aparatur masih lebih terfokus pada kegiatan teknis lapangan daripada konseptor.

Hasil analisis terhadap faktor kelemahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi seperti disajikan pada tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 3.7. Matrik Analisis Faktor Kelemahan

Penilaian Kelemahan	Bobot	Nilai	Tertimbang
2. Kurangnya anggaran dan pembiayaan	20	3	60
2. Sarana dan Prasarana	15	3	45
3. Pelaksana Teknis Lapangan	35	4	140
4. Mutu Sumberdaya Aparatur	30	3	90
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>		<b>335</b>

## B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal terdiri dari variabel peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dalam manajemen puncak. Analisis lingkungan eksternal menekankan pada pengenalan dan mengevaluasi kecenderungan pada peristiwa yang di luar kendali institusi. Analisis lingkungan eksternal mengungkapkan peluang kunci dan tantangan yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, sehingga pimpinan dapat merumuskan strategi untuk memanfaatkan



peluang dan mengurangi dampak ancaman. Tujuan analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengembangkan daftar terbatas peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dan ancaman yang harus dihindari.

Dalam upaya untuk menyediakan pelayanan untuk pengembangan peternakan dan pembinaan kesehatan hewan secara optimal, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi memiliki sejumlah peluang. Berikut ini diuraikan sejumlah peluang utama yang dapat dimanfaatkan untuk memacu upaya peningkatan pengembangan pelayanan peternakan dan pembinaan kesehatan hewan di Provinsi Jambi:

#### 1) Potensi Sumber Daya Alam

Peluang pengembangan lahan pertanian di Provinsi Jambi masih cukup besar tersedia yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penambahan baku lahan pertanian. Saat ini areal pertanian dan lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal masih ada, seperti lahan kering dan lahan rawa pasang surut/lebak serta peningkatan intensitas pertanaman (IP) pada lahan beririgasi. Potensi sumber daya ini perlu dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat pertanian terutama tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Provinsi Jambi masih kaya dengan keanekaragaman hayati pangan. Dengan kondisi tersebut, terdapat ribuan jenis sumber daya hayati tanaman yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai sumber pangan. Selain dimanfaatkan langsung sebagai sumber pangan, keanekaragaman hayati tanaman yang ada dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai bahan pembentukan varietas unggul tanaman pangan.



Di Provinsi Jambi terdapat itik kerinci yang merupakan satu-satunya plasma nutfah ternak yang ada di Provinsi Jambi dan telah diakui oleh Pusat, ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 2834/Kpts/LB/08/2012. Keberadaan itik kerinci menyebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci dimana populasi terbesar berada di Kecamatan Air Hangat, atas dasar tersebut Kecamatan Air Hangat, tepatnya di Desa Kotomajidin ditetapkan sebagai Sentra Pengembangan Ternak Itik Kerinci

Disamping itu, Kondisi lahan yang secara umum subur, iklim yang mendukung ketersediaan air (hujan) hampir sepanjang waktu merupakan peluang yang sangat menguntungkan untuk pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

## 2) Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi tepat guna sampai saat ini belum sepenuhnya diterapkan karena masih rendahnya modal petani, masih terbatasnya akses petani terhadap lembaga permodalan, masih relatif rendahnya SDM petani. Hal ini menyebabkan produktivitas dan pertumbuhan sektor pertanian rendah. Introduksi teknologi tepat guna harus terus-menerus dikembangkan agar pertanian mampu menjadi sektor andalan dan penggerak pembangunan.

Di sektor peternakan, penerapan teknologi dalam rangka meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak, sehingga dapat menghasilkan keturunan dari bibit pejantan unggul adalah Inseminasi Buatan (IB). Di Provinsi Jambi telah terdapat Balai Inseminasi Buatan yang berada di bawah UPTD Balai Pembibitan Ternak Provinsi Jambi telah dapat memproduksi semen beku untuk pelaksanaan IB, walaupun



produksi semen bekunya belum dapat memenuhi kebutuhan semen beku di Provinsi Jambi.

3) Peningkatan permintaan produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

Pasar domestik sangat berpotensi untuk pemasaran produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dan cenderung meningkat terus akibat pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, budaya pola konsumsi masyarakat jambi yang menyebabkan tingginya permintaan beras dan daging di Provinsi Jambi. Budaya masyarakat jambi yang sangat bergantung dengan beras sebagai makanan pokok, untuk itu perlu penganeekaragaman pola konsumsi, melalui produksi umbi-umbian dan produk hortikultura lainnya. Demikian pula untuk konsumsi daging, dimana budaya masyarakat jambi mengharuskan daging sebagai makanan yang wajib ada saat perayaan hari besar. Hal ini menuntut agar produksi padi dan daging terus meningkat seiring dengan peningkatan penduduk di Provinsi Jambi.

4) Tenaga Kerja

Ketersedian tenaga untuk pembangunan tanaman pangan di Provinsi Jambi relatif masih tersedia jumlahnya dan masih murah. Dengan lambatnya pertumbuhan sektor industri dan jasa yang menyebabkan masih terdapat limpahan tenaga kerja di sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Pemanfaatan secara optimal jumlah dan murahnya upah tenaga kerja yang ada merupakan peluang untuk meningkatkan pembangunan tanaman pangan.

5) Investasi



Insentif investasi dalam kegiatan agribisnis belum mencukupi terutama yang berkaitan dengan kebijakan makro ekonomi dan besarnya resiko dibidang agribisnis. Apabila diberikan kompensasi atas resiko yang berkaitan sifat - sifat alamiah produk pertanian yang mempunyai tingkat ketergantungan tinggi terhadap alam, musiman dan mudah rusak, maka minat investasi dibidang pertanian dapat meningkat.

Untuk bidang peternakan Dinas telah melakukan kerjasama melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang dimaksudkan mengurangi resiko masyarakat dalam pengembangan ternak sapi. Asuransi ternak sapi difokuskan pada perlindungan dalam bentuk ganti rugi kepada peternak jika terjadi kematian sapi karena penyakit, kecelakaan, beranak atau hilang akibat aksi pencurian.

Bantuan modal oleh Pemerintah perlu sebagai langkah awal dalam mempercepat pembangunan pertanian. Saat ini pemerintah telah meluncurkan sejumlah skim kredit program yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha peternakan seperti KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dan KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi). Skim kredit ini dimungkinkan untuk membantu petani dalam memperoleh modal lunak guna pengembangan usahanya.

Hasil analisis terhadap faktor peluang pengembangan pelayanan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi disajikan pada tabel 2.27 berikut ini.

Tabel 3.8. Matrik Analisis Faktor Peluang



Penilaian Peluang	Bobot	Nilai	Tertimbang
1. Potensi Sumber Daya Alam	25	4	100
2. Teknologi	10	2	20
3. Peningkatan permintaan produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	20	4	80
4. Tenaga Kerja	25	4	100
5. Investasi	20	2	40
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>		<b>340</b>

Selain memiliki sejumlah peluang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sesungguhnya menghadapi sejumlah tantangan guna meningkatkan pelayanan dalam pengembangan peternakan dan pembinaan kesehatan hewan di Provinsi Jambi. Berikut ini dijelaskan secara singkat sejumlah tantangan utama dimaksud.

1) Lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

Keberlanjutan sektor tanaman pangan dan hortikultura dihadapkan pada ancaman yang serius, yakni akibat luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian. Sedangkan kemampuan cetak lahan baru yang diusahakan oleh pemerintah belum bisa menyamai laju konversi lahan. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.

Selama ini usaha peternakan menggunakan lahan kosong di pemukiman atau lahan yang ditanamii tanaman pangan maupun perkebunan. Penyebab hal ini karena tidak ada regulasi seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang memberikan ruang untuk peternakan. Akibatnya, sering kawasan peternakan yang maju usahanya terusir untuk kepentngan pemukiman atau usaha lainnya.



2) Sarana dan prasarana yang belum menjamin aksesibilitas

Sarana produksi pertanian merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung perkembangan atau kemajuan pertanian. Adopsi dan aplikasi teknologi di tingkat petani juga masih relatif rendah dan belum optimal dikarenakan petani dominan menjalankan usaha taninya berdasarkan cara konvensional.

Salah satu prasarana pertanian yang kondisinya memprihatinkan adalah jaringan irigasi dimana daya dukung irigasi bagi subsektor tanaman pangan mengalami penurunan seiring dengan kerusakan yang terjadi pada jaringan irigasi dimaksud sehingga petani mengalami kesulitan untuk berusaha tani karena tidak tersedianya air.

Akses sarana transportasi menjadi salah satu faktor penghambat dimana petani masih sering mengalami kesulitan memperoleh sarana produksi pertanian diantaranya petani masih sering mengalami kesulitan untuk memperoleh benih dan pupuk tepat waktu sesuai dengan jadwal tanam di lapangan. Sarana transportasi juga menjadi hambatan bagi sebagian petani di Provinsi dalam menjual produk hasil pertaniannya.

3) Penurunan kapasitas dan mutu sumber daya lahan dan air

pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dihadapkan pada penurunan kapasitas dan mutu sumberdaya lahan dan air. Dari segi kualitas, faktanya lahan pertanian sudah mengalami degradasi yang luar biasa, tingkat kesuburan lahan yang selama ini diusahakan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena kurang pedulinya petani terhadap kaidah-kaidah pelestarian lingkungan. Salah satu penyebabnya adalah akibat dari penggunaan pupuk an-organik, Sedangkan dari segi kuantitas, lahan pertanian banyak yang beralih fungsi.



Sumberdaya air dipengaruhi oleh curah hujan dan daerah tangkapan air. Akibat terjadinya anomali iklim dan kerusakan daerah tangkapan air, ketersediaan dan kualitas air ke depan makin berkurang. Disisi lain penggunaan sumberdaya air makin meningkat yang semula kebanyakan untuk pertanian, dewasa ini dimanfaatkan juga untuk industri, perkotaan dan pemukiman dan ditambah lagi dengan perubahan iklim global dan pengrusakan lingkungan. Dengan demikian ketersediaan sumberdaya air untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan semakin berkurang.

4) Kurangnya minat generasi muda untuk bertani dan beternak

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah kualitas sumber daya manusia pertanian yang sebagian besar belum produktif, kebijakan finansial yang belum berpihak kepada petani/pelaku agribisnis. Disisi lain generasi muda yang berminat bekerja di sektor pertanian cenderung menurun; dan apabila ini tidak diantisipasi di masa mendatang, pembangunan sektor pertanian akan menghadapi masalah, terutama dalam mendorong aktivitas agribisnis di pedesaan.

5) Tingginya resiko tertular penyakit hewan menular

Provinsi Jambi termasuk wilayah yang rawan tertular penyakit dari Provinsi lain karena merupakan daerah lalu lintas ternak antar Provinsi. Kondisi tersebut mengandung konsekuensi tindakan pencegahan dini terhadap kemungkinan timbulnya penyakit menular dari wilayah lain. Jenis penyakit menular yang perlu diwaspadai di Provinsi Jambi antara lain : Rabies, Anthrax, Avian Influenza/flu burung, Septicaemia Epizootica, jembrana dan Brucellosis. Anthrax merupakan penyakit hewan menular yang hanya dapat dikendalikan namun tidak dapat dibebaskan. Hal ini berkaitan dengan sifat spora bakteri antrax yang dapat bertahan di



dalam tanah selama lebih dari 60 tahun. Anthrax pernah terdapat di Provinsi Jambi tepatnya di Desa Rantau Majo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 1988, sehingga tindakan pencegahan terhadap anthrax di daerah tersebut harus tetap dilaksanakan. Selain itu, faktor resiko menjadi lebih tinggi dikarenakan kurangnya tenaga dokter hewan di Provinsi Jambi.

Hasil analisis terhadap faktor yang dianggap sebagai tantangan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam pelayanan pengembangan peternakan dan pembinaan kesehatan hewan di Provinsi Jambi di sajikan pada tabel 2.28 berikut ini.

Gambar 3.9. Matrik Analisis Faktor Tantangan

Penilaian Ancaman	Bobot	Nilai	Tertimbang
1. Lahan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	20	3	60
2. Sarana dan prasarana yang belum menjamin aksesibilitas	20	3	80
3. Penurunan kapasitas dan mutu sumber daya lahan dan air	20	3	60
4. Kurangnya minat generasi muda untuk bertani dan berternak	20	3	60
5. Tingginya resiko tertular penyakit hewan menular	20	3	60
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>		<b>320</b>

Dari hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dipetakan sejumlah alternatif



strategi yang harus dijalankan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi guna meningkatkan perannya dalam pelayanan pengembangan peternakan dan pembinaan kesehatan hewan. Matrik alternatif strategi dimaksud disajikan pada tabel 3.9 berikut ini.



<p style="text-align: center;"><b>Faktor Eksternal</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Faktor Internal</b></p>	<p><b>Peluang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi Sumber Daya Alam</li> <li>2. Teknologi</li> <li>3. Peningkatan Permintaan Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan</li> <li>4. Tenaga Kerja Petani</li> <li>5. Investasi</li> </ol>	<p><b>Tantangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan</li> <li>2. Sarana dan prasarana yang belum menjamin aksesibilitas</li> <li>3. Kapasitas dan Mutu Sumber Daya Lahan dan Air</li> <li>4. Kurangnya Minat Generasi Muda Untuk Bertani dan Beternak</li> <li>5. Tingginya resiko Tertular Penyakit Hewan Menular</li> </ol>
<p><b>Kekuatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Lintas Institusi</li> <li>2. Jumlah Sumberdaya Aparatur</li> <li>3. Keanekaragaman Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan</li> <li>4. Bertambahnya Jumlah PPL</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan jejaring kerjasama antar institusi</li> <li>2. Optimalisasi kinerja aparatur</li> <li>3. Memanfaatkan PPL dalam memperkenalkan tehnologi pertanian dan peternakan</li> <li>4. Mendorong Akselerasi Peningkatan Produktivitas, Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Melalui Penerapan Teknologi sejalan dengan peningkatan permintaan pasar</li> <li>5. Peningkatan potensi sumber daya untuk memproduksi aneka ragam produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dalam rangka mencapai ketahanan pangan</li> <li>6. Optimalisasi program bantuan kredit</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi program kerja lintas institusi</li> <li>2. Mendorong Percepatan Diversifikasi Produksi Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan agar tidak bergantung pada satu jenis pangan saja</li> <li>3. Peningkatan sarana dan prasarana pada kawasan sentra dalam upaya peningkatan produksi</li> <li>4. Mendorong Peningkatan Efisiensi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran</li> <li>5. Pemanfaatan Aparatur dan PPL dalam rangka memperkenalkan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan untuk mengurangi penurunan mutu lahan dan air</li> <li>6. Memperluas akses informasi mengenai peluang kerja dalam bidang pertanian untuk menarik minat generasi muda untuk bertani dan beternak</li> <li>7. Pemanfaatan Aparatur dan PPL dalam peningkatan pengetahuan petani dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular</li> </ol>
<p><b>Kelemahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Anggaran dan Pembiayaan</li> <li>2. Sarana dan Prasarana</li> <li>3. Pelaksana Teknis Lapangan</li> <li>4. Mutu Sumberdaya Aparatur</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan anggaran dan pembiayaan untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya</li> <li>2. Mendorong Peningkatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Yang Berkelanjutan</li> <li>3. Menciptakan produk yang bermutu dan berdaya saing dalam memenuhi peningkatan permintaan pasar</li> <li>4. Mendorong Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan Yang Ramah Lingkungan Dan Aman Di Konsumsi</li> <li>5. Pemberdayaan petani dan pembinaan aparat</li> <li>6. Sikronisasi pembinaan teknis lapangan dengan Kabupaten/Kota</li> <li>7. Peningkatan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan terhadap lahan pertanian untuk mencegah alih fungsi lahan dengan membuat RTRW untuk lahan pertanian dan mengupayakan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).</li> <li>2. Meningkatkan anggaran dan pembiayaan untuk Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana pertanian</li> <li>3. Menumbuhkembangkan Dan Mengoptimalkan Fungsi Kelembagaan Dan Manajemen Usaha Tani/Ternak untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani</li> <li>4. Pemanfaatan produk bioteknologi, seperti pupuk hayati yang mengandung mikroba yang membantu menyediakan unsur hara untuk memperbaiki struktur tanah</li> <li>5. Meningkatkan koordinasi dan peran petugas teknis lapangan dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular</li> </ol>



# BAB 4

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1. VISI DAN MISI SKPD

#### A. VISI

**S**ejalan Visi Gubernur Jambi, yakni JAMBI TUNTAS 2021 (TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA), dan MISI Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 diantaranya yang berkaitan dengan sektor pertanian yaitu : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan dan dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) maka norma – norma pokok dalam pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih mendasari spirit dalam pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Keberpihakan kepada masyarakat petani sebagai pelaku pembangunan pertanian akan menjadi prioritas utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam melakukan pembangunan pertanian.

Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi 2016 – 2021, yakni Ketahanan Pangan dan Sumberdaya Alam serta Lingkungan Hidup dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang menjadi perhatian pemerintah daerah Jambi untuk menunjang pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan,



untuk mengacu pada visi pemerintah Provinsi Jambi, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi menetapkan visi yaitu :

***“Pertanian Tangguh, Yang Berkeadilan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Petani dan Peternak serta Ketersediaan Produk Hewani yang ASUH Tahun 2021***

**B. MISI**

Untuk mencapai Visi tersebut disusunlah Misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi 2016 – 2021 sebagai berikut :

- a. Mendorong Pembangunan sumber daya manusia pertanian yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan produktif.
- b. Membina Kelembagaan dan Manajemen Usaha tani/ternak yang Efektif, Efisien dan Profesional.
- c. Mendorong peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan Yang Optimal dan bermutu.
- d. Memfasilitasi Terwujudnya Kawasan Produksi Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang Menghasilkan Produk yang Mempunyai Nilai Daya Saing Kompetitif dan Komparatif.
- e. Membangun Pertanian Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan Ramah Lingkungan Yang Terintegrasi.
- f. Mengoptimalkan sumberdaya peternakan untuk peningkatan populasi, produksi dan produktivitas komoditas peternakan dalam rangka mencapai swasembada ternak.
- g. Menciptakan usaha peternakan yang berdaya saing serta berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan peternak dan kesejahteraan masyarakat.
- h. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, serta mempertahankan zona bebas penyakit ternak menular.



- i. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet serta laboratorium yang prima melalui pengembangan sarana dan prasarana kesehatan hewan yang terakreditasi.
- j. Menyediakan dan menjamin peredaran produk hewani asal ternak yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas serta ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
- k. Memberdayakan dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia peternakan untuk peningkatan profesionalisme pelaku pembangunan peternakan.
- l. Memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi peternak sekaligus mendukung pengembangan ketahanan panga dan energi.
- m. Memfasilitasi kemudahan akses modal bagi peternak dan mendorong peran swasta dalam pembangunan peternakan.
- n. Mengembangkan kebun binatang menjadi sarana rekreasi masyarakat yang edukatif.

#### **4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

##### **A. TUJUAN**

Dengan visi dan misi, maka ditetapkan tujuan pembangunan pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi adalah sebagian berikut :

- a. Terwujudnya kemandirian Sumber Daya Manusia pertanian untuk meningkatkan Kesejahteraan.
- b. Pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani dan menumbuhkembangkan kelembagaan dan manajemen usaha tani untuk memacu aktivitas ekonomi rakyat.
- c. Meningkatkan Produksi dan Mutu Produk Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.



- d. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Berusaha dan Kesempatan Kerja di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- e. Terciptanya Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan (*Continuebel and Naturalism*).
- f. Meningkatnya pendapatan peternak melalui pengembangan usaha peternakan.
- g. Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas komoditas ternak untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar lokal dan regional.
- h. Meningkatnya status kesehatan ternak dan mempertahankan zona bebas penyakit ternak menular.
- i. Meningkatnya jaminan ketersediaan dan peredaran produk hewani asal ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

## **B. SASARAN**

Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui Visi dan Misi serta tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sumber daya manusia pertanian yang berkualitas.
- b. Terwujudnya kelembagaan pertanian yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
- c. Terwujudnya swasembada pangan strategis secara berkelanjutan.
- d. Diversifikasi Produksi Komoditi Hortikultura yang Cukup dan Berkualitas dalam upaya mengurangi ketergantungan konsumsi beras.
- e. Terwujudnya peningkatan mutu produk tanaman pangan.
- f. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- g. Meningkatnya ketersediaan bibit ternak baik jumlah maupun mutu melalui pengembangan kelompok pembibitan ternak yang tersebar pada kawasan sentra produksi peternakan.



- h. Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak sehingga dapat menurunkan pemasukan ternak dan produk hasil peternakan dari luar daerah.
- i. Meningkatnya derajat kesehatan hewan yang tercermin dari penurunan jumlah kasus penyakit hewan dan meningkatnya wilayah atau zona bebas penyakit hewan.
- j. Menurunnya derajat kontaminasi dan residu produk hewan yang tergambar dengan meningkatnya unit usaha yang menerapkan ASUH.
- k. Meningkatnya pelayanan prima pada masyarakat dalam pengembangan peternakan dan pembinaan kesehatan hewan.
- l. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

#### Proyeksi Produksi Komoditas Utama Tahun 2021

Sasaran Produksi 2016 – 2021 diperhitungkan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Lokal dan regional dengan memperhatikan trend perkembangan beberapa tahun sebelumnya. Adapun sasaran produksi Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SASARAN
A	TANAMAN PANGAN	
1	Padi	847.293 Ton GKG
2	Jagung	90.338 Ton GKG
3	Kedelai	10.968 Ton GKG
B	HORTIKULTURA	
1	Sayur-sayuran	321.315 Ton



2	Buah-buahan	233.550 Ton
C	Peternakan	
1	Populasi Sapi	176.667 Ekor
2	Populasi Kerbau	45.149 Ekor
3	Produksi Daging Sapi	4.726 Ton
4	Produksi Daging Kerbau	1.792 Ton

#### 4.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### A. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan diperlukan kebijakan strategis dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkembangan sistem dan usaha agribisnis melalui strategi pembangunan.

##### a. Pemberdayaan petani dan pembinaan Aparat

Prioritas pembangunan diarahkan pada pemberdayaan petani dan aparat pembina sehingga petani mampu mengelola dan mengembangkan usahataniya secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pendidikan/pelatihan, penguatan sarana kerja, dan pemanfaatan pola dan manajemen pembangunan.

Pemberdayaan petani dalam pembangunan pertanian adalah menempatkan petani sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan pertanian, artinya petani tidak hanya merupakan objek tetapi sebagai subjek pelaku pembangunan. Upaya-upaya untuk memberdayakan petani sebagai subjek pembangunan



pertanian dapat dilakukan melalui fasilitasi dan regulasi pemerintah yang mencakup aspek-aspek perlindungan, keberpihakan dan penciptaan peluang dalam mengembangkan usaha ekonomi petani.

Aparat Pembina dalam pembangunan pertanian adalah petugas penyuluh, pengawas benih, pengendalian hama dan penyakit lapangan, petugas medis, petugas paramedis, inseminator, petugas PKB dan petugas ATR yang diberi mandat untuk melakukan pendampingan petani di lapangan dalam melaksanakan kegiatan usaha tani/ternak, baik teknis maupun mempersiapkan administrasi dalam melakukan usaha tani/ternak tersebut.

**b. Menumbuhkembangkan Dan Mengoptimalkan Fungsi Kelembagaan Dan Manajemen Usaha Tani/Ternak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani**

Kelembagaan usaha tani/ternak perlu di tumbuh kembangkan untuk meningkatkan minat petani dalam berusaha tani/ternak. Sistem manajemen usaha tani/ternak yang dijalankan petani selama ini masih lemah dalam manajemen keuangan dan pola usaha tani/ternaknya, oleh karena itu perlu adanya pembinaan manajerial usaha tani/ternak (*Site Manager*) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani yang dapat diindikasikan dengan salah satu pengukuran yaitu rasio pendapatan petani (*B/C ratio*).

**c. Mendorong Akselerasi Peningkatan Produktivitas, Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Melalui Penerapan Teknologi**

Peningkatan produktivitas selama ini masih belum optimal. Dari segi potensi, di Provinsi Jambi Produktivitas masih berpeluang besar



untuk ditingkatkan. Potensi tersebut tercermin dari senjang rata-rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian. Untuk mendorong peningkatan produktivitas perlu dilakukan pewilayahan sesuai tingkat produktivitas yang ada, kondisi daerah, tingkat penerapan teknologi, serta kesiapan sarana prasarana pendukung. Untuk daerah-daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi dan berwawasan lingkungan, yang disertai pengembangan rekayasa sosial dan ekonomi.

Untuk mendukung percepatan proses adopsi inovasi teknologi perlu dilakukan demonstrasi-demonstrasi dan sekolah lapang di berbagai wilayah.

Untuk sektor tanaman pangan perlu dilakukan dengan menerapkan teknologi maju dan tepat guna dilokasi sentra produksi yang telah ada dengan mempertimbangkan keseimbangan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) pasar. Disamping itu untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (*IP*), akan dilaksanakan pembangunan kincir-kincir air, sehingga petani didaerah tersebut bisa tanam sesuai yang diharapkan minimal 2 kali dalam setahun.

Untuk sektor hortikultura, peningkatan produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan setempat (lokal) baik konsumsi maupun, peningkatan ekspor komoditi sayur-sayuran (kentang dan kubis).

Sedangkan untuk sektor peternakan, penerapan teknologi dalam rangka meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak, sehingga dapat menghasilkan keturunan dari bibit pejantan unggul adalah Inseminasi Buatan (IB).



**d. Peningkatan potensi sumber daya untuk memproduksi aneka ragam produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dalam rangka mencapai ketahanan pangan.**

Dalam rangka mengantisipasi meningkatnya konsumsi beras sejalan dengan penambahan penduduk, maka akan dilakukan upaya diversifikasi produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Upaya ini selain akan berdampak terhadap peluang pemanfaatan keragaman potensi ekologi, juga memperluas kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha agribisnis.

Potensi fisik dan peluang pasar komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan saat ini masih belum optimal. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mendorong pendapatan petani diperlukan upaya-upaya untuk mendorong diversifikasi produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sesuai kapasitas sumberdaya dan prospek pasar. Pengembangan komoditas hortikultura diprioritaskan melalui penumbuhan wilayah pengembangan sentra produksi di lahan baru yang memiliki kecocokan agroekosistem dengan mempertimbangkan daya serap dan permintaan pasar, nilai ekonomi, penguasaan teknologi dan lain-lain.

**e. Mendorong Peningkatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Yang Berkelanjutan**

Dalam rangka menekan susut hasil tanaman pangan yang masih tinggi diperlukan pembinaan untuk mendorong petani dalam peningkatan penanganan pasca panen tanaman pangan sehingga dapat mendukung peningkatan produksi yang berkelanjutan.

**f. Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana pertanian**



Melaksanakan pengembangan lahan dan air melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian (pengendalian alih fungsi lahan, perluasan areal pertanian melalui optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani).

Disamping itu, perlu ditingkatkan sarana dan prasarana pertanian berupa penyediaan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, pembiayaan serta sarana produksi pertanian lainnya.

Dan untuk sektor peternakan perlu peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang pakan, pengolahan pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Selain itu perlu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan hewan seperti obat-obatan, peralatan kesehatan hewan dan sarana dan prasarana puskesmas dalam upaya peningkatan derajat kesehatan hewan.

**g. Mendorong Peningkatan Efisiensi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.**

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, baik segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik dan efisien dalam proses produksi maupun pada tahap pemasarannya. Mutu produk yang efisien akan berpengaruh langsung terhadap harga dari setiap produk. Namun demikian perlu adanya upaya untuk mengurangi kehilangan hasil yang cukup tinggi pada saat penanganan pasca panen. Contohnya, dalam usaha menekan susutnya produksi padi perlu penyediaan alat perontok padi dan revitalisasi mesin penggilingan padi serta penyediaan lantai jemur di daerah sentra.

Pembinaan usaha dan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perlu dilakukan dalam rangka peningkatan



mutu produk. Memfasilitasi peningkatan akses pasar juga perlu dilakukan. Salah satu usahanya membuat pusat-pusat penjualan beras lokal di setiap kabupaten/kota yang dikelola oleh poktan/gapoktan, sehingga beras yang diproduksi oleh daerah Jambi dapat dinikmati oleh masyarakat jambi dengan kualitas yang baik dan harga bersaing dan dengan mengikuti pameran-pameran untuk mempromosikan produk-produk pertanian.

**h. Mendorong Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan Yang Ramah Lingkungan Dan Aman Di Konsumsi**

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) selama ini masih sangat bergantung pada input bahan kimia (pupuk kimia dan Pestisida) yang berpengaruh terhadap keberlanjutan kemampuan SDA tersebut dan residu bahan kimia terhadap metabolisme kesehatan konsumen. Hal ini menyebabkan penurunan kemampuan SDA dan tidak baiknya efek dari penggunaan bahan kimia terhadap kesehatan. Oleh karena itu perlu didorong agar petani dalam budidaya pertaniannya menggunakan sistem pertanian organik (*go organic*) yang ramah lingkungan dan produk hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dapat aman dikonsumsi. Selain itu, pembuatan biogas sebagai salah satu upaya pengurangan efek rumah kaca.

**B. ARAH KEBIJAKAN UMUM**

Kebijakan yang berkaitan dengan pertanian dan berada dalam kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dan yang perlu penanganan, antara lain adalah :

- a. Peningkatan Keterampilan Petani dan Petugas Serta Peningkatan Pendidikan Pertanian Tingkat Menengah



- a) Peningkatan ketrampilan petani, peternak dan petugas
- b) Peningkatan kualitas pendidikan pertanian tingkat menengah
- b. Pemberdayaan dan Penguatan Sistem Kelembagaan Pertanian Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
  - a) Kemandirian benih.
  - b) Mengembangkan benih varietas unggul baru.
  - c) Meningkatkan produksi dan distribusi benih.
  - d) Meningkatkan perbaikan mutu benih.
  - e) Pemberdayaan kelembagaan perbenihan.
  - f) Pemberdayaan Puskesmas dengan peningkatan pelayanan prima pada masyarakat peternakan.
  - g) Mendorong kelompok tani/ternak berbadan hukum
- c. Mendorong Akselerasi Peningkatan Produktivitas, Produksi Dan Mutu Melalui Penerapan Teknologi.
  - a) Peningkatan akses petani terhadap efisiensi teknologi, benih/bibit unggul bermutu, melalui penerapan teknologi spesifik lokasi.
  - b) Penyediaan dan pemanfaatan alat mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi usahatani.
  - c) Peningkatan Indeks Pertanaman.
  - d) Peningkatan efisiensi melalui penerapan teknologi untuk pasca panen, pengolahan dan pemasaran produk pertanian
  - e) Kebijakan peningkatan ketersediaan dan kualitas bibit ternak.
- d. Mendorong Percepatan Diversifikasi Produksi Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.



- a) Menumbuhkan dan mengembangkan sentra tanaman pangan alternatif
  - b) Menumbuhkan kawasan sentra Produksi Hortikultura.
  - c) Memantapkan dan mengembangkan kawasan sentra Produksi Hortikultura
  - d) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura yang ramah lingkungan dan aman dikonsumsi.
- e. Penyediaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pertanian
- a) Pengelolaan Lahan dan air
  - b) Optimalisasi pemanfaatan Lahan dan rehabilitasi lahan untuk meningkatkan luas pertanaman serta Pencegahan dan penanggulangan masalah alih Fungsi Lahan.
  - c) Perluasan areal Pertanian (Lahan Sawah, Lahan Kering dan Lahan Hortikultura)
  - d) Penyediaan dan pengembangan pupuk organik dan pestisida hayati.
  - e) Penyediaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian.
  - f) Dukungan Pembiayaan Pertanian.
- f. Mendorong Peningkatan Efisiensi Pasca Panen, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil
- a) Perbaikan penanganan pasca panen, terutama untuk komoditi pangan strategis (Padi, jagung dan Kedelai).
  - b) Perbaikan pengolahan dan mutu hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
  - c) Promosi produk, pengembangan dan pelayanan informasi pasar.



- d) Penerapan Teknologi Pertanian yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
- e) Gerakan dan Pemasyarakatan penggunaan pupuk organik
- f) Pemasyarakatan ***penggunaan pupuk organik "trichokompos"*** untuk mengurangi biaya pembelian dan ketergantungan terhadap pupuk kimia
- g) Penyediaan dan Pengembangan Pupuk organik dan pestisida hayati
  - 1) Peningkatan penggunaan pupuk organik dan pestisida hayati.
  - 2) Penyediaan sarana produksi secara 6 (enam) tepat.
  - 3) Peningkatan pengawasan peredaran penggunaan dan penyimpanan pupuk dan pestisida.
- h) Perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
  - 1) Pemantapan pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
  - 2) Pemasyarakatan penggunaan agens hayati dan pestisida nabati untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
  - 3) Peningkatan Pelayan Pos Informasi dan Pelayanan Agens Hayati (POS IPA).
  - 4) Peningkatan operasional laboratorium pengamatan hama dan penyakit tanaman
  - 5) Peningkatan operasional laboratorium keswan dan kesmavet
  - 6) Meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan.
  - 7) Jaminan keamanan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

### C. KEBIJAKAN OPERASIONAL



Kebijakan operasional yang berada dalam kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi dan Kabupaten antara lain adalah :

- a. Pemberdayaan Petani Dan Aparat Pembina
  - a) Peningkatan ketrampilan petani dan aparat pembina
    - 1) Melaksanakan Pelatihan bagi aparat Pembina
    - 2) Melaksanakan Pelatihan bagi petani
    - 3) Melaksanakan sekolah lapang pada kegiatan usaha tani/ternak di sentra-sentra kegiatan
    - 4) Melengkapi sarana dan prasarana pelatihan.
  - b. Penyediaan dan Perbaikan sarana prasarana pertanian
    - a) Pengelolaan Lahan dan Air
      - 1) Perbaikan lahan-lahan sawah melalui pembangunan Tata Air mikro (TAM)
      - 2) Pembangunan Irigasi Air permukaan (Kincir Air)
      - 3) Konservasi Air (embung, cekdam dan irigasi tanah dangkal dan tanah dalam)
      - 4) Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES).
    - b) Optimalisasi pemanfaatan Lahan dan rehabilitasi lahan untuk meningkatkan luas pertanaman serta Pencegahan dan penanggulangan masalah alih Fungsi Lahan.
      - 1) Penetapan regulasi untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk pencegahan alih fungsi lahan



- 2) Optimalisasi pemanfaatan lahan bero / tidur pada lahan pasang surut, sawah irigasi, tadah hujan, dan lahan kering.
  - 3) Rehabilitasi lahan pada Pengembangan Usaha Konservasi Lahan Kritis (PUKLK) dan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
- c) Penyediaan dan Perluasan Areal Pertanian
- 1) Perluasan areal sawah (cetak sawah)
  - 2) Perluasan areal hortikultura
  - 3) Penyediaan lahan untuk pengembalaan ternak
- d) Penyediaan dan Pengembangan alat dan mesin pertanian
- 4) Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).
  - 5) Penumbuhan dan pengembangan Usaha Perbengkelan Alsintan.
  - 6) Penyediaan alat dan mesin pertanian
  - 7) Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
- e) Penyediaan dan pengembangan pakan
- 1) Penyediaan bibit HMT dan pupuk
  - 2) Penyediaan peralatan penanaman dan perawatan HMT
  - 3) Bantuan konsentrat dalam usaha peningkatan produktivitas ternak
- f) Peningkatan derajat kesehatan hewan
- 1) Dukungan vaksin dalam usaha pencegahan PHMS
  - 2) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan hewan
- g) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian
- 1) Pembinaan dan pelatihan untuk unit-unit usaha (UKM/UMKM)



- 2) Pemberian bantuan peralatan pengolahan produk pertanian
  - 3) Peningkatan akses pasar
  - 4) Dukungan promosi produk pertanian
- h) Dukungan Pembiayaan Pertanian
- 1) Pemanfaatan dan penyaluran skim kredit pertanian
  - 2) Pengalokasian kredit pertanian
  - 3) Penyediaan dana talangan perbenihan.
  - 4) Sosialisasi asuransi ternak
- c. Mendorong Akselerasi Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Penerapan Teknologi.
- a) Peningkatan akses petani terhadap efisiensi teknologi, benih unggul bermutu, melalui penerapan teknologi spesifik lokasi.
- 1) Gerakan Turun ke sawah
  - 2) Pengembangan produksi padi sawah melalui sistem SRI
  - 3) Penumbuhan sentra produksi padi ladang
  - 4) Penumbuhan sentra produksi padi organik
  - 5) Pengembangan sentra kedelai, aneka kacang dan umbi lainnya.
  - 6) Penumbuhan dan Pengembangan sentra jagung.
- b) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)
- 1) Peningkatan IP pada lahan sawah, rawa lebak , lahan pasang surut maupun lahan kering
- c) Pengembangan tehnologi Inseminasi Buatan
- 1) Peningkatan sarana dan prasarana produksi semen beku



- d. Mendorong Percepatan Diversifikasi Produksi Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- a) Mengembangkan sentra-sentra tanaman pangan alternatif
    - 1) Peningkatan kuantitas Produk Umbi-umbian (ganyong, garut, dll) dan sereal lainnnya.
  - b) Memantapkan kawasan sentra-sentra Buah-buahan unggulan daerah )
    - 1) Perbaikan sentra Tanaman Buah-buahan unggulan daerah .
    - 2) Penataan Kawasan budidaya hortikultura skala ekonomis.
    - 3) Pembinaan kawasan komoditi hortikultura.
  - c) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura yang ramah lingkungan dan aman dikonsumsi .
    - 1) Pengembangan sentra sayuran organik
    - 2) Pengembangan dan Penumbuhan sentra sayur-sayuran di daerah dataran sedang dan rendah yang diarahkan kepada pertanian organik, untuk mensuplay daerah perkotaan.
  - d) Mengembangkan dan Menumbuhkan sentra-sentra produksi Hortikultura dataran tinggi yang dapat di pasarkan di pasar regional dan internasional.
    - 1) Pengembangan sentra sayur-sayuran di daerah dataran tinggi, yang diarahkan kepada pertanian organik.
  - e) Mengembangkan kawasan sentra peternakan
    - 1) Pembinaan petani tentang manajemen peternakan
    - 2) Pembentukan dan penguatan kelembagaan Poktan/Gapoktan



- e. Mendorong Peningkatan Efisiensi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
  - a) Perbaiki penanganan pasca panen, terutama untuk komoditi pangan strategis (Padi, Jagung dan Kedelai)
    - 1) Penyediaan alat dan mesin pasca panen
    - 2) Penyediaan lantai jemur di daerah sentra produksi
    - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas beras lokal Jambi
    - 4) Revitalisasi alat penggilingan padi (PPK/PPM).
    - 5) Mengembangkan pilot projek dan percontohan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil.
  - b) Perbaiki pengolahan dan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
    - 1) Memberikan penghargaan dengan kriteria mutu, rasa, skala usaha, tampilan produk yang dihasilkan pelaku usaha
    - 2) Menerapkan sistem jaminan mutu termasuk penerapan GAP,GHP, GMP, HACCP.
  - c) Promosi produk, pengembangan dan pelayanan informasi pasar
    - 1) Promosi produk pertanian yang bernilai tinggi dan strategis.
    - 2) Peningkatan pelayanan informasi pasar.
    - 3) Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kemitraan usaha.
- f. Mendorong penguatan kelembagaan sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura
  - a) Kemandirian benih



- 1) Peningkatan dan Pemberdayaan Balai Benih Padi, palawija dan Hortikultura
  - 2) Pemberdayaan penangkar benih, terutama di sentra produksi.
  - 3) Penyusunan kebijakan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
- b) Mengembangkan benih varietas baru
- 1) Sosialisasi penggunaan benih varietas unggul baru
  - 2) Demplot benih varietas unggul baru
- c) Meningkatkan produksi dan distribusi benih
- 1) Peningkatan produktivitas benih
  - 2) Perbaikan pasca panen dan processing benih
  - 3) Peningkatan sistem Jalur Benih Antar Lapangan (JABAL).
  - 4) Peningkatan pemasaran dan kemitraan perbenihan.
- d) Meningkatkan SDM kelembagaan perbenihan
- 1) Forum Perbenihan TPH
  - 2) Apresiasi dan sinkronisasi Perbenihan
- e) Pembinaan dan pengawasan peredaran mutu benih
- 1) Pemasyarakatan penggunaan benih varietas unggul dan bermutu
  - 2) Pengembangan sistem informasi perbenihan
  - 3) Pembinaan dan pengawasan peredaran mutu benih



# BAB 5

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

**S**esuai dan selaras dengan Visi Gubernur Jambi, yakni JAMBI TUNTAS 2021, (TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA) dan MISI Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, diantaranya Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis Dan Agroindustri, dengan prioritas : Ketahanan pangan dan Sumberdaya Alam serta Lingkungan Hidup, maka program yang akan dilaksanakan diantaranya adalah :

### A. Program Pembangunan Pertanian Alokasi Dana APBN

#### 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Program ini mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a) Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penyediaan sarana produksi dan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan.
- b) Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman serealialia yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.
- c) Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.



- d) Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat.
- e) Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi.
- f) Terselenggaranya sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat.

***Kegiatan utama berupa :***

- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
- Pengelolaan produksi tanaman serealia
- Pengelolaan Sistem penyediaan benih tanaman pangan
- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

***Indikator Kinerja dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :***

- Luas penerapan budidaya aneka kacang dan umbi (ha)
- Luas penerapan budidaya padi (ha)
- Luas penerapan budidaya jagung hibrida (ha)
- Luas penerapan budidaya padi organik (ha)
- Luas perbanyakan benih sumber (ha)
- Jumlah Desa Mandiri Benih (unit)
- Jumlah benih yang tersertifikat (Kg)
- Jumlah pemantapan penerapan PHT (Kelompok)
- Luas penerapan penanganan PHT (Ha)



- Jumlah gerakan pengendalian OPT (Orang)
- Jumlah maksimal luas areal tanaman pangan yang menerapkan DPI (ha).
- Jumlah dokumen manajemen tanaman pangan (Dokumen)
- Jumlah penyaluran sarana pascapanen tanaman pangan (Unit)
- Jumlah penyaluran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Unit)
- Jumlah pengembangan standarisasi dan mutu (Unit)
- Jumlah informasi harga tanaman pangan (Komoditi)

## **2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.**

Program ini mempunyai sasaran yaitu peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura dalam rangka mendukung peningkatan diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani di daerah

***Kegiatan utama berupa :***

- Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
- Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
- Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura
- Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
- Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

***Indikator Kinerja dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :***

- Produksi hortikultura (buah, sayuran, tanaman obat, tanaman florikultura) (Ton).
- Peningkatan ketersediaan benih bermutu (Ton).



- Luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen (%).
- Luas Kawasan tanaman buah (Ha).
- Jumlah Registrasi kebun tanaman buah (Kebun).
- Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman buah (Unit).
- Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah (Kelompok).
- Pengembangan registrasi packing house (Unit).
- Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman buah (Lembaga).
- Luas Kawasan tanaman florikultura (M<sup>2</sup>).
- Registrasi lahan usaha tanaman florikultura (Unit usaha).
- Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman florikultura (Unit).
- Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman florikultura (Kelompok).
- Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman florikultura (Lembaga).
- Luas Kawasan tanaman sayuran (Ha).
- Luas Kawasan tanaman obat (Ha).
- Registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan obat (Unit usaha).
- Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman sayuran dan obat (Unit).
- Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman sayuran dan obat (Kelompok).
- Perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha tanaman sayuran dan obat.
- Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman sayuran dan obat (Lembaga).
- Ketersediaan Benih sayuran bermutu (Kg).
- Ketersediaan Benih tanaman florikultura bermutu (Benih).



- Ketersediaan Benih tanaman obat bermutu (Kg).
- Ketersediaan Benih tanaman buah bermutu (Batang).
- Jumlah Lembaga perbenihan hortikultura (Unit).
- Peningkatan kapasitas laboratorium perbenihan hortikultura (Unit).
- Fasilitas pengelolaan OPT (Kali).
- Rekomendasi dampak fenomena iklim (Rekomendasi).
- Lembaga perlindungan tanaman hortikultura (Unit).
- Draft pest list persyaratan teknis SPS (*Draft pest list*) (Dokumen).
- Jumlah SLPHT (Kelompok).
- Peningkatan kapasitas laboratorium perlindungan tanaman hortikultura (Unit)

### **3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**

Program ini mempunyai sasaran yaitu :

- a). Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pendayagunaan/peningkatan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal pertanian
- b). Meningkatnya luasan areal pertanian baru dalam mendukung peningkatan produksi pertanian
- c). Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian
- d). Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian



***Kegiatan utama berupa:***

- Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
- Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
- Penyaluran pupuk bersubsidi
- Pelayanan pembiayaan pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

***Indikator Kinerja dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :***

- Meningkatnya efisiensi dan ketersediaan air pada lahan-lahan pertanian.
- Meningkatnya luasan areal pertanian baru (Ha).
- Jumlah sarana irigasi pertanian yang dibangun (Unit atau Km).
- Jumlah panjang jalan usaha tani (Km)
- Luas areal pertanian baru yang dibangun (ha).

**4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat**

***Kegiatan utama berupa:***

- Peningkatan Produksi Ternak
- Peningkatan Produksi Pakan Ternak
- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak
- Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
- Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak



## **B. Program Pembangunan Pertanian Alokasi Dana APBD**

### **1. Program Peningkatan Produksi Pertanian**

Program ini mempunyai sasaran terwujudnya swasembada padi, jagung dan kedelai secara berkelanjutan pada tahun 2021.

***Kegiatan utama berupa :***

- Akselerasi peningkatan produksi Padi
- Pengembangan kedelai melalui sentra pengembangan
- Pengembangan Sentra Jagung
- Penguatan kelembagaan perbenihan padi
- Pengembangan kawasan sentra sayuran organik
- Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura
- Penguatan kelembagaan perbenihan palawija
- Penguatan perbenihan kentang Kayu Aro
- Pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan
- Pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman hortikultura
- Pengembangan teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) berbasis agens hayati
- Penguatan kelembagaan POS IPA
- Penumbuhan dan penguatan penangkar benih tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
- Pengembangan tanaman hias
- Pembinaan pengembangan hortikultura
- Penguatan kelembagaan perbenihan kentang Jangkat
- Penetapan zonasi lahan pertanian berkelanjutan



**Indikator Kinerja** dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan minimal memenuhi kebutuhan daerah dan maksimal dapat memenuhi standar internasional yang diekspor ke Luar Negeri (Ton).
- Jumlah ketersediaan benih bermutu dan berkualitas komoditi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan (Ton).
- Jumlah penggunaan benih bermutu dan berkualitas di tingkat petani yang memenuhi SNI (Ha).
- Penurunan tingkat serangan hama dan penyakit sampai di ambang batas ekonomis (Ha).
- Meningkatkan pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan (Ha) dan hortikultura (Unit).
- Meningkatnya pengawasan mutu terhadap benih yang beredar tanaman pangan (Ha) dan hortikultura (Kg).
- Meningkatkan ketersediaan plasma nutfah anggrek dan tanaman hias (Jenis).

## **2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian**

Program ini mempunyai sasaran yaitu Peningkatan mutu produk hasil tanaman dan hortikultura daerah, meningkatnya penjualan hasil produk lokal dan tersedianya data informasi pasar seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

**Kegiatan utama** berupa :

- Pembinaan pengolahan dan promosi hasil pertanian

**Indikator Kinerja** dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Penurunan tingkat kehilangan hasil (*lossing*) (%).



- Meningkatnya hasil rendemen beras (%).
- Meningkatnya pemasaran domestik dalam upaya mencapai peluang ekspor produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura (jenis komoditi).
- Meningkatkan hasil olahan dan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura (jenis komoditi).
- Menurunnya persentase serangan hama dan penyakit pada tanaman pangan, hortikultura dan peternakan (%)
- Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP).

### **3. Program Penerapan teknologi Pertanian**

Program ini mempunyai sasaran meningkatnya penerapan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan pertanian, terutama pemanfaatan dan pengelolaan lahan dengan teknologi ramah lingkungan.

***Kegiatan utama berupa :***

- Pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan pupuk dan pestisida.
- Pembinaan pemanfaatan alat dan mesin pertanian.
- Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Tata Air Mikro (TAM).

***Indikator Kinerja dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :***

- Peningkatan Indeks Pertanaman (IP).
- Luas alih fungsi lahan (Ha).
- Jumlah fasilitas dan sarana yang sesuai kriteria pertanian yang baik (*good agriculture*) (Unit).
- Luas lahan pertanian ramah lingkungan (Ha).



#### 4. Program peningkatkan Kualitas SDM Pertanian

**Kegiatan utama** berupa :

- Kegiatan diklat peningkatan kompetensi sdm pertanian
- Kegiatan pemberdayaan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan tani
- Kegiatan penyebaran informasi dan teknologi penyuluhan
- Kegiatan pengembangan program dan peningkatan kapasitas penyuluh
- Kegiatan pembinaan dan evaluasi penyuluhan

**Indikator Kinerja** dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui diklat (Orang).
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui bimbingan lanjutan Purnawidya (Orang).
- Pengabdian masyarakat (Unit).
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan Petugas Penyuluh Lapangan (Orang).
- Meningkatkan kualitas pendampingan Petugas Penyuluh Lapangan melalui demplot penerapan teknologi budidaya pertanian (Unit/Ha).

#### 5. Program Peningkatan Produksi Peternakan

**kegiatan utama** sebagai berikut :

- Pengembangan Balai Pembibitan Ternak
- Pengembangan sarana dan prasarana pembibitan ternak
- Pengembangan perbibitan dan produksi ternak
- Pengembangan pakan ternak



**Indikator Kinerja** dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Terpeliharanya sapi bull dan sapi bibit di Balai Pembibitan Ternak
- Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana Balai Pembibitan Ternak
- Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana Balai Inseminasi Buatan
- Peningkatan produksi semen beku dalam upaya penyediaan benih sapi unggul
- Peningkatan ketersediaan bibit ternak lokal bermutu
- Peningkatan populasi dan produksi ternak ruminansia dan nonruminansia
- Pembinaan dan fasilitasi kelompok ternak
- Peningkatan jumlah kelompok ternak binaan
- Peningkatan penyediaan pakan bermutu dan berkualitas
- Peningkatan pengawasan mutu pakan
- Peningkatan kualitas SDM pakan

#### **6. Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan**

**kegiatan utama** sebagai berikut:

- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis.

**Indikator Kinerja** dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Penurunan angka kematian ternak
- Peningkatan pelayanan kesehatan hewan



## 7. Program Pengembangan Usaha Peternakan

**kegiatan utama** sebagai berikut :

- Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

**Indikator Kinerja** dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas mutu produk, sarana dan pemasaran
- Peningkatan pembinaan unit usaha PPHP
- Penguatan unit usaha PPHP

## 8. Program Peningkatan Usaha Peternakan

**kegiatan utama** sebagai berikut:

- Penguatan kelembagaan peternakan

**Indikator Kinerja** dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan jumlah kelompok tani ternak yang berbadan hukum
- Peningkatan akses permodalan untuk kelompok tani ternak
- Peningkatan kualitas kelompok tani ternak
- Peningkatan fasilitasi asuransi ternak

## 9. Program Peningkatan dan pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner

**kegiatan utama** sebagai berikut:

- Peningkatan dan pengembangan fungsi kesehatan masyarakat veteriner

**Indikator Kinerja** dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Penurunan tingkat cemaran produk hasil peternakan
- Peningkatan pembinaan unit usaha pangan asal hewan dalam upaya menjamin keamanan pangan
- Penguatan RPH



- Peningkatan unit usaha yang bersertifikasi NKV
- Terlaksananya pengawasan pemotongan betina produktif di RPH

**10. Program Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner**

***kegiatan utama*** sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- Monitoring, Surveilans dan Pemeriksa

***Indikator Kinerja*** dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan jumlah sampel dan specimen yang diperiksa
- Peningkatan jumlah pengujian yang bersertifikasi
- Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium
- Peningkatan kapasitas SDM laboratorium
- Penguatan laboratorium type C

**11. Program Peningkatan Pelestarian Satwa, edukasi dan rekreasi masyarakat**

***kegiatan utama*** sebagai berikut:

- Pengembangan pelayanan pengunjung dan ketatausahaan
- Pemeliharaan dan perawatan satwa
- Pengembangan kebun binatang



***Indikator Kinerja*** dari program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Tersedianya fasilitas dan sarana prasarana kebun binatang
- Peningkatan jumlah pengunjung dalam upaya peningkatan PAD
- Peningkatan jumlah satwa
- Penurunan angka kematian satwa

Program dan kegiatan yang dijelaskan diatas merupakan program dan kegiatan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pelayanan teknis pengembangan peternakan dan pembinaan kesehatan hewan. Selain itu terdapat sejumlah program dan kegiatan pendukung yang tidak dicantumkan pada Renstra ini, merupakan kegiatan berkaitan dengan manajemen organisasi yang bersifat rutin seperti peningkatan sumberdaya aparatur, penerapan SPI (Sistem Pengendalian Internal), penyediaan prasarana dan sarana perkantoran serta peningkatan jejaring kerjasama lintas institusi.



# BAB 6

## PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dan arahan bagi masing – masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, LSM dan Masyarakat.

**GUBERNUR JAMBI,**

**H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI**



# Lampiran-Lampiran



